

SKRIPSI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM KEMITRAAN DI PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

**NUR AMINY SAHUDIN
E211 13 505**



**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Nur Aminy Sahudin (E211 13 505), Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan Di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015, xvi + 102 Halaman + 4 Tabel + 7 Gambar + 25 Daftar Pustaka (2006-2013) + 5 Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D. dan Dr. Badu Ahmad, M.Si

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan yang dilaksanakan guna meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba yang dihasilkan oleh BUMN.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar tahun 2015 yang dilaksanakan melalui Program Kemitraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Pada pembayaran angsuran pinjaman belum ditemukan adanya angsuran yang tidak lancar hingga macet, karena masa perjanjian dengan Mitra Binaan pada tahun 2015 belum berakhir. Namun, pada pelaksanaan pembinaan Mitra Binaan masih belum efektif.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Program Kemitraan



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Nur Aminy Sahudin (E21113505), Implementation of Corporate Social Responsibility Partnership Program in Port of Indonesia IV (Persero) Branch of Makassar in 2015, xvi + 102 pages + 5 Tables + 7 Pictures + 25 Bibliographys (2006-2013) + 5 Appendixs + Supervised by Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D. And Dr. Badu Ahmad, M.Si

This research is based on the implementation of Corporate Social Responsibility of Partnership Program which is implemented to increase small business to become tough and independent through the utilization of fund from the profit generated by BUMN.

In general, this research aims to describe the implementation of Corporate Social Responsibility in Port of Indonesia IV (Persero) Branch of Makassar in 2015 implemented through Partnership Program. The method used in this research is qualitative method. Data searching is by interview and and collecting related documents.

The results of this study indicate that implementation of Partnership Program in Port of Indonesia IV (Persero) Branch of Makassar in 2015 is implemented well in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) that has been set. On repayment of loan installments have not found any installment that is not stalled, because the period of agreement with partner assisted on 2015 not yet over. However, the implementation of guidance counseling still not effective.

Keywords: Implementation, Corporate Social Responsibility, Partnership Program



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aminy Sahudin
NIM : E211 13 505
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM KEMITRAAN DI PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2015" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 24 Mei 2017



Nur Aminy Sahudin

E211 13 505



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Aminy Sahudin
NIM : E211 13 505
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 4 April 2017

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D.
Nip 19481202 198103 1 001

Dr. Badu Ahmad, M.Si.
Nip 19621231 198903 1 028

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Hashiati, S.Sos, M.Si
Nip. 19680101 199702 2 001



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Aminy Sahudin
NIM : E211 13 505
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program
Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang Kota Makassar Tahun 2015

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Mei 2017

Menyetujui :

Pembimbing I,

Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D.
Nip 19481202 198103 1 001

Pembimbing II,

Dr. Badu Ahmad, M.Si.
Nip 19621231 198903 1 028

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si
Nip. 19680101 199702 2 001



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NUR AMINY SAHUDIN

NIM : E211 13 505

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PROGRAM KEMITRAAN DI PERSEROAN
TERBATAS PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
CABANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin pada hari **Selasa, 9 Mei 2017**

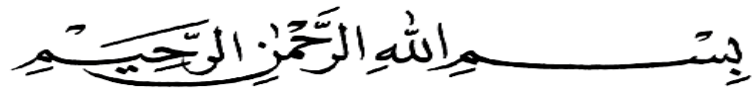
Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Badu Ahmad, M.Si

Anggota : 1. Dr. Syahribulan, M.Si
2. Dr. Muh. Tang Abdullah, M.Si
3. Drs. Lutfi Atmansyah, MA

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhana wa ta'ala, pencipta alam semesta atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan Di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015"** yang merupakan salah satu persyaratan untuk lulus dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dalam bertindak.

Ucapan terima kasih tak lupa juga penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis, **Sahudin** dan **Nurjannah**. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya untuk Ayah dan Ibunda penulis yang telah mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai saat ini, hingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak lagi. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan juga do'a dari orang tua penulis, semoga Ayah dan Ibunda penulis dirahmati oleh Allah SWT, amin. Tidak lupa juga penulis haturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar, kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi dengan cepat.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Unhas beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hj. Hasniati, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D.** selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Badu Ahmad, M.Si.** selaku pembimbing II dan penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak **Dr. Lutfi Atmansyah, MA,** Ibu **Dr.Syahribulan, M.Si** dan Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, M.Si** selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

8. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
9. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi** dan **staff di lingkup FISIP UNHAS** tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
10. Pihak **PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar** atas kesediaannya memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Teman seangkatan penulis **RECORD'13 (Regeneration Colored Of Determined)**, terima kasih telah menjadi keluarga selama 3 tahun di kampus Universitas Hasanuddin ini. Telah memberikan pengalaman dan cerita tersendiri selama ini. Terimakasih sudah mengajarkan arti kekompakan dan kebersamaan selama ini. Suatu pengalaman berharga bisa dipertemukan dalam satu RECORD. Semoga kita tetap kompak sampai seterusnya, amiiin.
12. Segenap Keluarga Besar **HUMANIS FISIP UNHAS** terimakasih atas pengalaman, pengetahuan serta kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Untuk **Safrilian, Fita, Titi, Dewi, Uci, Arni, Ais, Dini, Nurul, Vita, Epi, Uni, Adel, Eca dan Cindy** terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kenangan-kenangan berharganya selama ini.
14. Teman-teman **KKN Gelombang 93 Universitas Hasanuddin Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Desa Karueng** (Kak Edo, Ikram, Dian, Novi, Minu). Terima kasih telah menjadi keluarga selama penulis ber KKN, terima kasih saat kurang lebih 2 bulan masa KKN telah membantu penulis menjalankan salah satu proses pengabdian masyarakat.

15. Terima kasih kepada **Kak Wahyu, Kak Irfan, Kak Ani**, dan **Kak Mina** yang senantiasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Mei 2017

Penulis,

NUR AMINY SAHUDIN

NIM. E211 13 505

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| BAB I..... | PENDAHULUAN |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 8 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA |
| II.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) | 10 |
| II.1.1 Sejarah Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 15 |
| II.1.2 Landasan Teoritis <i>Social Responsibility</i> | 26 |
| II.1.3 Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i> | 32 |
| II.1.4 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> | 33 |
| II.1.5 Prinsip-Prinsip <i>Social Responsibility</i> | 34 |
| II.1.6 Model Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> .. | 37 |
| II.1.7 Bentuk-Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> | 40 |
| II.2 Penerapan CSR Pada BUMN | 41 |
| II.3 Program Kemitraan dalam Badan Usaha Milik Negara | 44 |
| II.4 Kerangka Pikir | 48 |

| | | |
|-------------------|---|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| III.1 | Pendekatan Penelitian | 49 |
| III.2 | Desain Penelitian | 50 |
| III.3 | Fokus Penelitian | 50 |
| III.4 | Informan..... | 50 |
| III.5 | Jenis Data | 51 |
| III.5.1 | Data Primer..... | 51 |
| III.5.2 | Data Sekunder | 52 |
| III.6 | Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| III.7 | Teknik Analisis Data..... | 53 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| IV.1 | Gambaran Umum Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)..... | 55 |
| IV.2 | Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | 57 |
| IV.3 | Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | 57 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| V.1 | Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar..... | 62 |
| V.1.1 | Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar | 64 |
| V.1.2 | Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar..... | 77 |
| V.1.3 | Mekanisme Peminjaman dan Penagihan Dana Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar | 79 |
| V.1.4 | Mekanisme Pemulihan Pinjaman Bermasalah Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar | 82 |
| V.1.5 | Mekanisme Pembinaan Mitra Binaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar | 85 |

| | | |
|----------------------|--|-----|
| V.2 | Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2011-2015 | 87 |
| V.3 | Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015 | 90 |
| V.4 | Manfaat Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015 | 93 |
| BAB VI PENUTUP | | |
| VI.1 | Kesimpulan | 97 |
| VI.2 | Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 100 |
| LAMPIRAN..... | | 102 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1 Konsep <i>Triple Bottom Line</i> | 25 |
| Gambar II.2 Kerangka Berpikir | 47 |
| Gambar IV.1 Struktur Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero)..... | 58 |
| Gambar V.1 Bagan Alur Analisa Kelayakan Calon Mitra Binaan | 72 |
| Gambar V.2 Rumus Menentukan Besaran Pinjaman | 74 |
| Gambar V.3 Prosedur Pengajuan Pinjaman dan Penyaluran Dana Kemitraan..... | 76 |
| Gambar V.4 Alur Penyaluran Dana Program Kemitraan..... | 78 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel IV.1 | Karakteristik Staf Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) | |
| | Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 59 |
| Tabel IV.2 | Karakteristik Staf Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) | |
| | Berdasarkan Pangkat/ Golongan | 60 |
| Tabel V.1 | Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan | |
| | PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun | |
| | 2011-2015..... | 85 |
| Tabel V.2 | Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan | |
| | PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun | |
| | 2015..... | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di Indonesia BUMN dikenal dengan Perseroan, Perum dan Perusahaan Jawatan. Ketiganya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Istilah BUMN pada dasarnya merupakan singkatan dari frasa kata 'Badan Usaha Milik Negara'. Jika diartikan secara singkat maka BUMN merupakan perusahaan atau lembaga usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara.

Menurut Undang – Undang RI No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah setiap badan usaha yang baik seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, dimana melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan.

Beberapa fungsi didirikannya perusahaan BUMN adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penyedia produk (berupa barang dan jasa) bagi masyarakat;
- b. Sebagai media bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan perekonomian Indonesia;
- c. Sebagai media penyediaan lapangan pekerjaan;
- d. Sebagai sumber penghasilan devisa negara;
- e. Sebagai media pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- f. Sebagai pendorong / stimulan timbulnya peluang usaha baru;
- g. Sebagai pengelola sumber daya alam milik negara;

- h. Sebagai pelopor pembangunan berbagai sektor usaha yang belum terjamah pihak swasta.

Dalam perkembangannya perusahaan milik negara pada saat ini dituntut untuk tidak hanya berbicara keuntungan dan kegiatan produksi saja melainkan wajib memperhatikan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perusahaan milik negara diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial terutama lingkungan dimana perusahaan itu berada. Karena munculnya pandangan bahwa lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam perkembangan bidang ekonomi bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya.

Menyikapi kondisi tersebut, beberapa perusahaan milik negara merasa penting untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Seiring munculnya kesadaran bahwa kegiatan produksi secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan perusahaan mempengaruhi lingkungan sosial maupun lingkungan fisik di sekitar tempat kegiatan produksi perusahaan.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan perusahaan, kemudian muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminology tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) selanjutnya disingkat CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, *Social*

Responsibility of the Businessmen tahun 1953 (Harper and Row, New York). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. (Riyadi, Perpustakaan.bappenas.go.id).

Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR sangat dipandang perlu untuk diterapkan dalam perseroan. Dilihat dari aturan tersebut, CSR merupakan kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi

kemampuan sumber daya alam. Dalam penyelenggaraannya, CSR dimasukkan sebagai biaya perseroan dan harus memperhatikan prinsip kepatuhan dan prinsip kewajaran. Selain itu, CSR didasarkan pada ide keseimbangan hubungan antara perseroan, lingkungan, dan sosial yang ketiganya tidak dapat dipisahkan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka CSR bukan lagi sekedar “tren” dalam arti tanggung jawab etis. CSR merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan perusahaan sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap lingkungan eksternalnya. Dalam kenyataannya, perusahaan masih menunjukkan sikap yang saling bertolak belakang. Satu sisi menunjukkan sikap yang “meremehkan” peranan perusahaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa tujuan perusahaan hanya untuk mencari keuntungan atau laba. Pada sisi lain masih ada perusahaan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat, terutama masyarakat disekitar perusahaan, di samping tetap berorientasi mencari untung (Wahyudi dan Azheri, 2008 : xxii)

Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini diundang-undangkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan CSR yang dikenal dengan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL di dalam BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU tersebut, telah jelas mengatur tentang CSR dimana tertuang dalam pasal 88 ayat (1) “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

Selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian aturan ini direvisi menjadi Kepmen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan dilanjutkan dengan revisi terbaru yaitu Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan ini, kewajiban pelaksanaan CSR secara jelas tertuang dalam Bab II pasal 2 ayat (1) "Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini".

Corporate Social Responsibility (CSR) di dalam BUMN dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, merupakan program untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba yang dihasilkan oleh BUMN. Sedangkan, Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut program BL merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pelaksanaan CSR selama ini masih terdapat masalah yang dihadapi. Beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan, programnya lebih terfokus pada kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam. Selain itu, program CSR yang banyak di jalankan oleh

perusahaan masih banyak yang memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. Program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan di dalam masyarakat. Seringkali pihak perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Sehingga kegiatan CSR dilaksanakan hanya bersifat sukarela tanpa memiliki manfaat jangka panjang.

CSR seharusnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan *public expose* atau sebatas *charity programs* untuk menggaet simpati masyarakat sekitar. Tetapi, berupa program kegiatan yang memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, program CSR yang dilaksanakan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip CSR yaitu *sustainability* (keberlanjutan), *accountability* (akuntabilitas), dan *transparency* (tranparansi). Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* yaitu *profit*, *planet*, dan *people*.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. PT Pelindo IV berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah di lingkungan Perusahaan, dengan menunjukkan perilaku

bersahabat dengan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Kemudian komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR). Program CSR PT Pelindo IV dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. PT Pelindo IV mengacu pada paradigma dimana perusahaan menyadari bahwa untuk berkembang secara berkelanjutan perusahaan harus mampu menempatkan *profit, planet, people* sebagai dasar pengelolaan perusahaan. Hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat harus dibangun untuk menjaga keberlanjutan perusahaan.

Wilayah kerja dari PT. Pelindo IV (Persero) mencakup wilayah Indonesia Bagian Timur, yang meliputi wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah melaksanakan program PKBL sejak tahun 1992. Sejak tahun 1992 hingga saat ini total penyaluran dana PKBL sebesar Rp. 81,57 Miliar, yang terdiri dari program kemitraan yaitu program pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah sebesar Rp. 50.45 Miliar dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp. 31.12 Miliar.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT Pelindo IV tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya, pada pelaksanaan Program Kemitraan terjadi salah persepsi di masyarakat yang beranggapan bahwa Program Kemitraan merupakan bentuk sumbangan atau hibah dari perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan dalam proses peminjaman. Terlebih lagi tidak diperbolehkan sita anggunan apabila Mitra

Binaan tidak dapat mengembalikan pinjaman karena PT. Pelabuhan Indonesia IV bukan merupakan badan keuangan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki itikat baik untuk mengembalikan atau membayarkan angsuran dana pinjaman dari Program Kemitraan ini.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan Di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015.

I.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

I.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai CSR khususnya pada badan usaha yang berbentuk BUMN.

I.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai suatu bahan informasi, pertimbangan demi menghasilkan konsep dan program CSR yang lebih baik dimasa mendatang.
- 2) Sebagai bahan kajian bagi para peneliti yang dapat mengambil poin-poin pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan wacana tentang CSR ini berkembang menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi berbagai teori dan konsep yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Secara garis besar tinjauan pustaka menguraikan teori dan konsep mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*).

II.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*)

Corporate Social Responsibility menurut bahasa diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran peraturan tersebut. Dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Dari definisi di atas, ditekankan bahwa Perseroan wajib ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan di masyarakat. Hal tersebut demi meningkatkan kualitas Perseroan itu sendiri maupun komunitas dan masyarakat pada umumnya.

Meskipun telah menjadi *trend* yang semakin rame diperbincangkan, *social responsibility* belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli,

praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi. Johnson dan Johnson (Hadi, 2011:46) mendefinisikan CSR, yaitu:

“Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society”.

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Definisi lain diberikan oleh Holme and Watts (Hadi, 2011:46) mengatakan bahwa:

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as off the local community and society at large”

Ghana (Hadi, 2011:46) mendefinisikan:

“Corporate Social Responsibility building for sustainable livelihoods. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government”. Lebih lanjut dinyatakan,..... *“corporate social responsibility (CSR) is about business giving back to society”.*

Batasan yang diberikan Ghana tersebut memberikan penjelasan secara lebih dalam, bahwa sesungguhnya tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan kapasitas dalam membangun *corporate building* menuju terjaminnya *going concern* perusahaan. Didalamnya, termasuk upaya peka (*respect*) terhadap adopsi sistematis

berbagai budaya (kearifan lokal) kedalam strategi bisnis perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah.

Flaherty (Hadi, 2011:47) berpendapat*from the economist's view point the problem of corporate social responsibility is matter of distribution of cost that include not only money cost but also human costs or social costs.*

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

lewat publikasinya "*Making Good Business Sense*" mendefinisikan *corporate social responsibility* (Hadi, 2011:47) :

"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as off the local community and society at large"

Pendapat lain diberikan oleh Nuryana (2005) (Meutia, Vol. 2 No 2 2012:132) menurutnya, CSR sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Definisi lain dikemukakan oleh Kartini (2009:1) mengemukakan bahwa; "*Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial korporat, yakni merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh *stakeholders*, pada setiap organisasi laba atau nirlaba, tingkat manajemen puncak, dengan berskala besar, skala local, nasional, regional, atau global. Atau dengan kata lain CSR adalah merupakan pemangku kepentingan yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan dan publik lainnya serta pemerintah". Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rahman (2009:10) yang mengemukakan bahwa CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal,

dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas.

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Hadi (2011:45) memberikan pengertian mengenai *corporate social responsibility*, yaitu: “*Corporate Social Responsibility* merupakan pembagian tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, agar terjadi keseimbangan eksploitasi”.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup *stakeholders* dan masyarakat luas. Peningkatan tersebut baik dari segi ekonomi maupun sosial agar terjadi keseimbangan eksploitasi.

McWilliams dan Siegel (Mursitama, 2011:23) mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan. Sedangkan pengertian lain diberikan oleh Rangkuti (2009:187) mengatakan bahwa CSR tidak lagi merupakan biaya sosial yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan publisitas perusahaan.

Para ahli lain juga memberikan pendapat terhadap CSR, diantaranya Michael Hopkins (Wahyudi dan Azheri, 2008:34) dalam *Working Paper* yang disampaikannya kepada *Policy Integration Departement World Commission on the Social Dimension of Globalization International Labour Office*, Genewa tahun 2004 menjelaskan bahwa CSR adalah:

“CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. ‘Ethically or responsible’ means treating stakeholders in

a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility, stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation”.

Dari penjelasan Michael Hopkins tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR dapat berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap *stakeholders* baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab. Perlakuan secara etis atau bertanggungjawab yaitu memperlakukan *stakeholders* dengan cara yang bisa diterimanya. Secara sosial meliputi tanggungjawab ekonomi, dan tujuan tanggungjawab sosial yang lebih luas adalah untuk menciptakan standar hidup lebih tinggi, selagi memelihara profitabilitas perusahaan.

Dalam prakteknya sendiri, CSR diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Atas dasar etika tersebut, Certo dan Certo (Wahyudi dan Azheri, 2008:34) mendefinisikan CSR sebagai:

“.....managerial obligation to take action that protects and improves both the welfare of society as a whole and the interest of organization.”

Sementara itu, Lawrence, Weber dan Post (Wahyudi dan Azheri, 2008:34) menyatakan bahwa:

“CSR means that a corporation should be held accountable for any of its pactions affect people, their communities and their environment.”

Menurut Lako (2011: 5-6) CSR merupakan kewajiban asasi perusahaan yang tidak boleh dihindari. Dasar argumentasinya adalah bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik

sengaja maupun tidak sengaja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Definisi lain diberikan oleh Davis dan Frederick (Wahyudi dan Azheri, 2008:35) menyatakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Selanjutnya Keith Davis (Solihin, 2011:16) memberikan rumusan tanggung jawab sosial sebagai berikut: *“businessmen’s decisions and action taken for reasons at the least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest”*.

Definisi diatas menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

II.1.1 Sejarah Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tanggung jawab perusahaan. Hal itu karena,

peningkatkan pengetahuan masyarakat meningkatkan keterbukaan ekspektasi masa depan dan sustainabilitas pembangunan (Hadi, 2011:48).

Pergeseran dampak negatif industrialisasi memicu illegitimasi masyarakat, karena peningkatan pengetahuannya Belkaoui dan Karpik (Hadi, 2011:48). Dowling (Hadi, 2011:48) menyatakan legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada. Perubahan nilai, norma, dan peradaban masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan secara meluas. Disitulah letak peran *social responsibility*, mengingat *social responsibility* merupakan bagian dari perluasan tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan *social responsibility* perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan *social responsibility* bersifat dinamis, sesuai dengan konteks yang melingkupinya.

Batasan konsep *social responsibility* mengalami perkembangan dalam sejarah keberadaannya. Mengingat *social responsibility* salah satunya muncul dari tuntutan *stakeholders* sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki terganggu oleh eksistensi perusahaan. Sesuai dengan metaanalisis dan memperhitungkan karakter dekadenya, perkembangan *social responsibility* dibagi menjadi tiga periode, yaitu (Hadi, 2011:49):

1. Perkembangan awal yang masih diwarnai konsep tradisional yaitu antara 1950-1960.
2. Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980.
3. Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang.

1. Perkembangan Awal *Social Responsibility* Tahun 1950-1960-an

Perkembangan awal *social responsibility* masih dipahami secara sederhana. Pada saat itu, *social responsibility* dipahami sebagai duma perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Menurut cara pandang tradisional, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) lebih didasarkan pada aktivitas yang bersifat karitatif. Gema tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dimulai sejak tahun 1960-an saat dimana secara global masyarakat dunia baru pulih dari excess Perang Dunia I dan II, serta mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan.

Melalui karyanya yang berjudul "*social responsibilities of the business*" Howard R. Bowen (Hadi, 2011:49) membagi dua karakter *social responsibility*, yaitu: (1) bentuk *social responsibility* belum seperti yang kita kenal sekarang ini, mengingat buku itu ditulis pada saat dunia bisnis belum mengenal bentuk korporasi sebagaimana kita pahami sekarang ini; (2) konteks *social responsibility* saat itu masih bias gender, mengingat pelaku bisnis dan manajer di Amerika saat itu (negara *icon* industriliasasi dunia) masih didominasi kaum pria. Sehingga, pada saat itu dimensi *social responsibility* terhadap kaum minoritas (kaum wanita) belum begitu tampak. *Social responsibility* masih diwarnai (dominasi) dengan kegiatan karitatif jangka pendek, dan merupakan sikap murah hati kaum pemodal.

Bowen memberikan rumusan *social responsibility*, bahwa:

".....it refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society".

Rumusan tersebut sesungguhnya nampak masih sederhana, yaitu adanya itikad baik para pelaku bisnis untuk mengenal kewajiban dan dalam menetapkan tujuan memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Batasan lebih meluas dinyatakan oleh Keith Davis (Hadi, 2011:49) yang melihat *social responsibility* dalam spektrum yang lebih luas, yaitu:

“.....businessman decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firms's direct economic or technical interest”.

Batasan tersebut mengakui secara eksplisit , perusahaan disamping memiliki tanggung jawab secara ekonomi juga tanggung jawab secara sosial. Meskipun, cara pandang mereka masih diwarnai *mainstream* ekonomi klasik. Wujud pengakuan tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan upaya perusahaan menggunakan kaidah efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang serba terbatas dalam rangka memproduksi barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa dengan harga terjangkau dan rasional sesuai dengan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberi keuntungan bagi faktor-faktor produksi,serta distribusi pendapatan lewat pembayaran pajak. Berbagai dimensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan., meskipun masih dalam ranah motif perusahaan yaitu *economic motive*.

Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dapat muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan daya nalar masyarakat yang mengitari, dan peran kekuasaan sosial yang ada (*social agent effectiveness*). dengan demikian, peran tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dilakukan perusahaan berkontribusi terhadap penciptaan legitimasi masyarakat.

Melihat karakter tanggung jawab sosial (*social responsibility*) era tahun 1960-an tersebut, sesungguhnya ditemukan karakter pemicu tanggung jawab sosial pada masa itu, antara lain:

- 1) Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis (*business ethic*) secara personal pemilik

modal (juragan), sehingga tanggung jawab sosial merupakan bentuk sikap derma yang ditujukan pada masyarakat sekitar (Hadi, 2009).

- 2) Wujud tanggung jawab sosial (*social responsibility*) bersifat karitatif (*charity activity*) dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal. Bentuk apa, kapan, dan kepada siapa bantuan diberikan, sangat tergantung pada kemauan sang juraga (Wibisono Yusuf, 2007).
- 3) Tipe kontrak pelaksanaana yang mendasari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) bersifat *stewardship principle*. Konsep tersebut mendudukan pelaku bisnis (*businessmen*) sebagai *steward* (wali) masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Melihat karakter praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa praktik tanggung jawab sosial perusahaan belum didasarkan pada *community based* dan dampak *negative externalities* yang ditimbulkan. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) lebih didudukan sebagai amal sholeh pemodal, yang muatan dan esensinya lebih karena etika baik pemodal belaka.

2. Perkembangan *Social Responsibility* Era Tahun 1970-1980

Pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi muncul dalam "*The Future Capitalism*" yang ditulis oleh Lester Thurow (Wibisono, 2007), bahwa kapitalis (yang menjadi *mainstream* ekonomi selama ini) tak hanya berfokus pada persoalan ekonomi (*economic rational*), namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan (*social respektive*) sebagai basis *sustainable* perusahaan di mata *society*. Tulisan tersebut sesungguhnya merupakan babak awal pergeseran

tanggung jawab perusahaan secara lebih maju. Hal ini ditunjukkan dengan orientasi perusahaan ke arah *stakeholders respective* dan dimasuki pemikiran ke depan tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Para pelaku bisnis (*businessmen*) telah secara sadar dan terencana berpikir bagaimana seharusnya melakukan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Meskipun, hal itu masih dilihat dari perspektif kepentingan pemodal (perusahaan).

Pada tahun 1970-an, terbitlah "*The Limits to Growth*" yang merupakan buku monumental ditulis oleh *Club of Rome* yang sampai sekarang selalu diperbaharui. Buku tersebut mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan daya dukung, sementara manusia bertambah secara eksponensial, sehingga eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (Hadi, 2011:52).

Turut meramalkan perkembangan *social responsibility* di era ini adalah terbentuknya *Community for Development (CED)* tahun 1970-an yang merupakan bangunan kelompok perusahaan di Amerika dan para peneliti. Pernyataan *Community for Development (CED)* dituangkan dalam "*Social Responsibility of Business Corporation*" tahun 1971.

Laporan *Community for Development (CED)* mengakui secara jelas, bahwa eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial (*social contract*). Substansi kontrak sosial (*social contract*) tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab secara lebih luas kepada masyarakat, sampai pada

pengindahan dan pengedepanan beragam nilai sosial kemasyarakatan yang mengitari (*human values*). Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kenaikan kehidupan masyarakat, yang bukan hanya sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat.

Tuntutan lebih besar terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, yang secara harian sangat bersentuhan langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Untuk itu, tanggung jawab sosial sangat penting untuk mengurangi *negative externalities*, disamping juga memiliki *multiplier effect* besar terhadap pengurangan beban sosial masyarakat. Hal itu sejalan dengan pendapat Drucker (Hadi,2011:54), bahwa.....*the conscience of a business is measured by its public espousal of popular social goals and the highest moral development is the best intentions.*

Di era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari basis *philantrophy* ke arah yang lebih produktif lewat *community development (CD)*. Intinya, kegiatan derma yang sebelumnya kental dengan pola derma kariatif, bergeser ke arah pola pemberdayaan masyarakat, seperti: pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan intiplasma, dan sejenisnya.

Uraian tersebut di atas dapat ditangkap tentang pergeseran gejala kesadaran para pelaku bisnis dalam menangkap fenomena empiris lapangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan operasional usaha yang dipraktikkan. Hal itu, ditunjukkan dengan bentuk, pola, dan strategi keberpihakan perusahaan dalam merespon dampak *negative extenlities* baik terhadap lingkungan fisip maupun non fisik lewat strategi tanggung jawab sosial

perusahaan (*social responsibility*). Jika pada era sebelumnya, praktik *social responsibility* lebih dilihat sebagai bentuk derma perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga aktivitasnya terbungkus dalam kegiatan *philanthropy*. Era tahun 1970-an bergeser menjadi komprehensif dan manusiawi. Wujud aktifitas yang dilakukan lebih bersitat *community development* (CD), sehingga unsur pemberdayaan masyarakat lebih dikedepankan.

3. Perkembangan Social Responsibility Era Tahun 1990-an hingga Sekarang

Dasawarsa 1990-an adalah periode praktik *social responsibility* yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society* (Wibisono Yusuf, 2007:6). Ragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktik *community development* yang lebih manusiawi dalam bentuk peran pemberdayaan. *Community development* akhirnya menjadi satu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dengan lintas pelaku sebagai konsekuensi keterlibatan berbagai pihak. Pendekatan ini telah mengena dalam banyak dimensi, dengan melibatkan berbagai elemen sehingga berjalan secara integral, sampai pada level *grass root*.

Tahun 1987 *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission* melaporkan lewat publikasi Oxford University Press berjudul “*our Common Future*” (Hadi, 2011:55). Satu poin penting dalam laporan tersebut adalah dikemukakannya konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), yaitu:

“*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”.

Laporan *The Brundtland Commission* tersebut nampaknya menjadi awal pergeseran paradigma praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang secara konseptual dan strategi dituangkan dalam aplikasi *sustainability development*. Konsep *sustainability development* mengandung aspek penting dalam rangka menjaga keseimbangan, baik dilihat dari isi maupun *horizon* waktu. Hal itu ditunjukkan dengan kaidan dan aplikasi *sustainability development* yang memasukkan dimensi pembangunan saat ini dengan tidak mengorbankan kemampuan dan kebutuhan generasi muda di masa datang.

Satu terobosan besar perkembangan gema praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dikemukakan oleh John Elkington (Hadi, 2011:56). Yang dikenal dengan "*The Triple Bottom Line*" yang dimuat dalam buku "*Canibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan Cuma *profit* yang dikejar, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep *Triple Bottom Line* tersebut merupakan kelanjutan dari konsep *sustainable development* yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan tanggung jawab, baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder*. Konsep *Triple Bottom Line* nampaknya direspon oleh banyak kalangan karena mengandung strategi integral dengan memadukan antara *social motive* dan *economic motive*.

Berpijak dari konsep *triple bottom line* (3BL) yang kemudian oleh Elkington diumpamakan menjadi *triple P* (3P) yakni *profit, people, dan planet*. Ketiga komponen itu saling terkait satu sama lain. Apabila salah satu komponen ditinggalkan, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan,

sehingga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengubah paradigmanya menjadi *corporate image*. Sehingga akan berdampak pada jaminan kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas usaha suatu perusahaan.

Untuk mengetahui bagaimana urgensi dari masing-masing aspek dalam 3P dapat dilihat sebagai berikut (Wahyudi dan Azheri, 2008:135) :

1. ***Profit* (Keuntungan)**

Motivasi utama dari setiap kegiatan usaha jelas adalah mencari keuntungan (*profit*). Oleh karena itu berbagai upaya akan dilakukan oleh setiap pengelola perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau menaikkan nilai dari harga saham perusahaan. *Profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktifitas yang dapat ditempuh untuk mendorong *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi efektivitas yang tidak efisien menghemat waktu proses dan pelayanan .termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

Jika berpatokan pada *friedman paradigm* otomatis *profit* tersebut hanya akan dinikmati oleh *shareholders* saja. Namun ingat, *profit* yang diperoleh tidak terlepas dari partisipasi secara aktif maupun pasif dari *stakeholders* dalam makna luas. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan mendapat *profit* sudah

seoyogyanga pula perusahaan membagi keuntungan tersebut kepada *stakeholders*-nya dalam berbagai bentuk.

2. *People* (Masyarakat)

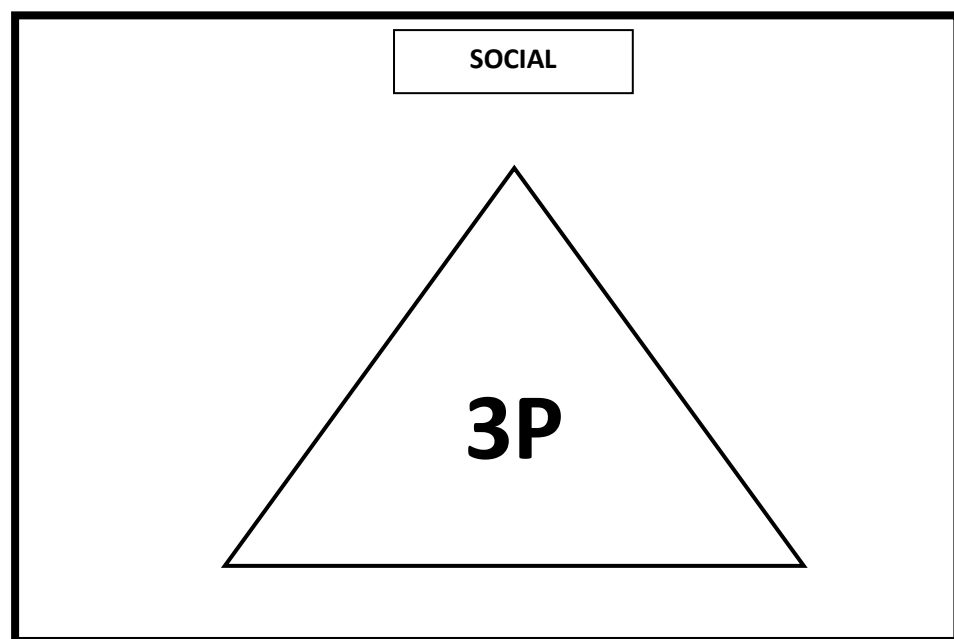
Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepedulian. Selain itu, perlu disadari bahwa operasional operasional suatu perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik dalam makna positif maupun negatif. Oleh karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagai kompensasi atas dampak yang diterima oleh masyarakat.

Diungkapkan oleh Budiono (Fajar, 2010:228) bahwa pelaksanaan CSR pada masyarakat sangatlah dibutuhkan karena dalam proses pembangunan masyarakat, untuk menanggulangi persoalan-persoalan sosial melibatkan tiga pilar ekonomi sebuah negara, yaitu pemerintah, masyarakat, dan korporasi.

3. *Planet* (Lingkungan)

Apabila aspek segala sesuatu yang berkaitan dengan *profit* dan *people* telah menjadi bagian dari suatu aktivitas dunia usaha, belumlah lengkap sebelum perusahaan memasukkan aspek lingkungan (*planet*) sebagai

bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Namun demikian perlu dipahami juga apa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu jika suatu perusahaan ingin eksis dan akseptabel untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggungjawabnya kepada lingkungan.



Sumber: Elkington dikutip Wahyudi dan Azheri (2008:134)

Gambar II.1 Konsep Triple Bottom Line

Melihat konteks sebagaimana di atas, interdependensi tanggung jawab sosial perusahaan dalam banyak perspektif menjadi satu keniscayaan. Lepasnya keterkaitan antar bentuk tanggung jawab, berarti awal merenda

suatu bencana, baik fisik maupun sosial. Konsep tanggung jawab perusahaan berbasis *development* merupakan *icon* dan *mainstream* pembangunan yang tak dapat ditawar.

II.1.2 Landasan Teoritis *Social Responsibility*

Teori *social responsibility* (Hadi, 2011:87) terdiri dari:

1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (Hadi, 2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat menurut Lindblom (Hadi, 2011:87), sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan di samping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan.

Gray et . al (Hadi, 2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan:

“a systems-oriented view of organisation and society....permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”.

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan pada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan, perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut, baik produk, metode, dan tujuan. Deegan, Robin dan Tobin (Hadi, 2011:89) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif menurut Pattern (Hadi, 2011:92), yaitu dengan cara:

- 1) Melakukan identifikasi dan komunikasi / dialog dengan publik
- 2) Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
- 3) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial (*social responsibility*)

Carroll, A. Dan Buchholtz, A. (Hadi, 2011:92) menyatakan perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa legitimasi perusahaan di mata *stakeholder* dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (*business ethics integrity*) serta

meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*). Wibisono (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*) memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga *image* dan strategi perusahaan.

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Menurut Harahap (Hadi, 2011:87) fenomena seperti itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Hummels (Hadi, 2011:94).....(*stakeholder are) individulas and groups who have legitimate claim on the organozation to participate in the decission*

making process simply because they are effected by the organisation's practices, policies, and actions.

Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktifitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder*.

Perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (*social setting*) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* menurut Adam. C.H (Hadi, 2011:94).

Esensi teori *stakeholder* tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *ezpectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan, hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, ke arah memperhitungkan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder oientation*).

3. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)

Kontrak sosial (*social contract*) muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan,

termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan, yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya, sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial (*social contract*) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.

Ilustrasi kontrak sosial antara perusahaan dan *stakeholder* menurut David (Hadi, 2011:96) yaitu adanya interrelasi dan interdependensi antara perusahaan dengan *stakeholder*, dan antara *stakeholder* dengan *stakeholder*. Sejalan dengan pendapat Roisseau, bahwa alam memberikan keteraturan, justru pihak yang di dalamnya memiliki kompetensi untuk menggesernya. Sehingga, dalam rangka menjaga keteraturan hukum alam tersebut, para pihak yang di dalamnya perlu melakukan perikatan kontrak (kontrak sosial) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Shocker dan Sethi (Hadi, 2011:98) menjelaskan konsep kontrak sosial (*social contract*) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup serta kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada:

- 1) Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- 2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak ada sumber power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan

legitimasi. Disitu, perusahaan harus melebarkan tanggung jawab tidak hanya sekedar *economic responsibility* yang lebih diarahkan kepada *shareholder* (*shareholder orientation*). Namun, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku (*legal responsibility*). Disamping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (*societal responsibility*).

II.1.3 Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Brodshaw dan Vogel (Wahyudi dan Azheri, 2008:46) menyatakan bahwa ada 3 dimensi dari garis besar ruang lingkup CSR, yaitu:

- 1) *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan langsung dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- 2) *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- 3) *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan 3 (tiga) dimensi ruang lingkup CSR tersebut, ternyata dalam prakteknya ada beberapa terminologi yang mempunyai kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan CSR antara lain pemberian amal perusahaan (*corporate giving/ carity*), kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*), relasi kemasyarakatan perusahaan (*corporate community/ public relations*).

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup CSR, maka Siregar (Wahyudi dan Azheri, 2008:51) membaginya atas dua ruang lingkup utama, yaitu:

- 1) Tanggung jawab institusional atau struktural berupa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan dengan adanya sanksi positif atau formal dari pemerintah apa bila tidak diindahkan.
- 2) Tanggung jawab kognitif atau interaksional yaitu tindakan sosial sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting atau dikerjakan oleh perusahaan. Baik oleh kebutuhan inheren produksi perusahaan maupun oleh panggilan moral, sosial, dan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan absennya sanksi positif apabila tidak diindahkan, tetapi dalam hal ini akan berlaku sanksi sosial atau formal lainnya

II.1.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini agar pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan dengan *stakeholders* yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholders*. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.

Manfaat penerapan CSR diuraikan (Untung, 2008:6), yaitu:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan

II.1.5 Prinsip-prinsip *Social Responsibility*

Ranah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial (*social responsibility*) juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Crowther David (Hadi, 2011:59) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu: (1) *sustainability*; (2) *accountability*; dan (3) *transparency*.

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. *Sustainability therefore implies that society must use no more than can be regenerated. This can be defined in term of the carrying capacity of the ecosystem.*

Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.

Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggung jawab sosial menurut Kasali Reinald menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun, informasi yang bersifat negatif justru menjadi bumerang perusahaan, dan cenderung memunculkan *image negatif*. David (Hadi, 2011:60) menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan (*disclosure*) memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa informasi yang disampaikan

perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan.

Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. David (Hadi, 2011:60) menyatakan:

“Transparency, as a principle , means that the external impact of the action of the organisation can be ascertained from that organisation’s reporting and pertinent facts are not disguised within that reporting.the effect of the action of the organisation, including external impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organisation’s reporting mechanism”.

Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Ragam tanggung jawab perusahaan menurut Post (Hadi, 2011:61) terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) *economic responsibility*; (2) *legal responsibility*; dan (3) *social responsibility*.

Economic responsibility, keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholder*, seperti: meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya. Disamping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut *interest* yang dikenakan.

Legal responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan perundangan.

Social responsibility, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingannya. *Social responsibility* menjadi suatu

tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi *externalities dis-economic*. Hal itu, memunculkan resistensi sosial dan dapat memunculkan konflik sosial.

Dari rincian prinsip-prinsip CSR sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip CSR tersebut tidak terlepas dari konsep *Triple Bottom Line* sebagaimana diungkapkan oleh John Elkington.

II.1.6 Model Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Konsep piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol (Suharto, 2006:4) memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat disekitarnya. Dalam pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab *filantropis*. Terdapat empat model CSR yang akan diuraikan sebagai berikut :

1) Tanggung jawab ekonomis,

Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

2) Tanggung jawab legal

Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

3) Tanggung jawab etis

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.

4) Tanggung jawab *filantropis*

Perusahaan selain harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan seluruh elemen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

Sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan harus mengakui bahwa permasalahan masyarakat adalah milik negara juga, dan memiliki komitmen untuk menanganinya. Dapat dikatakan, hal ini yang menjadi dasar untuk melaksanakan CSR. Terdapat empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia (Nirmana, Vol 8 No 2, 2006:96), yaitu:

1) Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3) Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos).

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan” pihak konsorium atau lembaga semacam itu yang dipercayai perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan dan cara-cara

pelaksanaannya, menentukan sumber pendanaan, menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan, melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program, hingga memonitor dan mengevaluasi kebijakan.

Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan sosial.

II.1.7 Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility*

Di kalangan sebagian dunia usaha, sudah tumbuh pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh CSR dalam aktivitas usahanya. Pada intinya, CSR merupakan komitmen dari sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau lebih dikenal dengan istilah "*triple bottom line*". Dalam implementasinya secara ringkas bentuk dari CSR dapat digolongkan dalam empat bentuk (Wahyudi dan Azheri, 2008:62), yaitu:

- 1) Pengelolaan lingkungan kerja secara baik termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
- 2) Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* dalam membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan

perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.

- 3) Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan itu sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar.kantor, pabrik, atau lahan.
- 4) Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*).

Menilik semua bentuk CSR tersebut, perusahaan memang perlu melakukan itu semua semata-mata untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari investasi, jadi bukan biaya. Semua itu bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu berusaha untuk menghasilkan keuntungan dan bertahan lama.

II.2 Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam system perekonomian nasional, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu mengembangkan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi (Wibisono, 2007:87).

Sebagai institusi bisnis, BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun disisi lain, pada saat yang bersamaan BUMN dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Disatu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat Negara.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 yang merupakan ketentuan perundangan mengenai BUMN, dikenal dua bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu perusahaan perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Sedangkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemmanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa sekaligus mengejar keuntungan (Wibisono, 2007:88).

Peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-236/MBU/2003 juncto Per-05/MBU/2007. Keputusan yang dikeluarkan

oleh Menteri Negara BUMN pada 27 April 2007 ini pada prinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan atau biasa disingkat dengan istilah PKBL.

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.

Walaupun berasal dari sumber yang sama, yaitu dari penyisihan laba setelah pajak, namun pemanfaatan dan peruntukan dana kedua program ini berbeda. Program Kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, serta penelitian. Sedangkan Program Bina Lingkungan karena pemberiannya lebih dimensi sosial diberikan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana atau sarana umum dan sarana ibadah. Yang jelas program ini menjadi sangat penting dalam konteks hubungan antara BUMN dengan masyarakat. Sebab. Melalui skema program ini perusahaan BUMN membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat yang ada disekitarnya.

Sementara itu, menurut Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 juncto Per-05/MBU/2007, setiap BUMN disyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani PKBL ini. Unit ini menjadi

bagian tak terpisahkan dari organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota direksi yang ditetapkan dalam rapat direksi (Wibisono, 2007:90).

II.3 Program Kemitraan dalam Badan Usaha Milik Negara

Definisi program Kemitraan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam bab 1 pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa:

“Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri”.

Program Kemitraan merupakan suatu program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Berdasarkan definisi kemitraan di atas , dapat dikemukakan beberapa unsur-unsur dari kemitraan tersebut, yaitu meliputi:

1. Adanya kerjasama antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar
3. Adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah atau besar untuk membimbing dan membina

pengusaha kecil mitranya dalam bentuk bekerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi besar (H.S Salim, 2006:177-178).

Program Kemitraan merupakan Program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, maka dalam hal ini yang menjadi objek atau sasaran dari Program Kemitraan adalah bentuk usaha dalam lingkup usaha kecil. Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diatur kriteria calon Mitra Binaan dalam BAB II pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Besar;
- d. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;

- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara telah mengatur mengenai sumber dana program kemitraan dalam Bab III Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Sumber Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
 - c. Hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana program Kemitraan dan program BL yang ditempatkan; dan
 - d. Sumber lain yang sah
- (2) Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.

Pasal 9 ayat (1) mengatur penyaluran bentuk dana Program Kemitraan, yaitu:

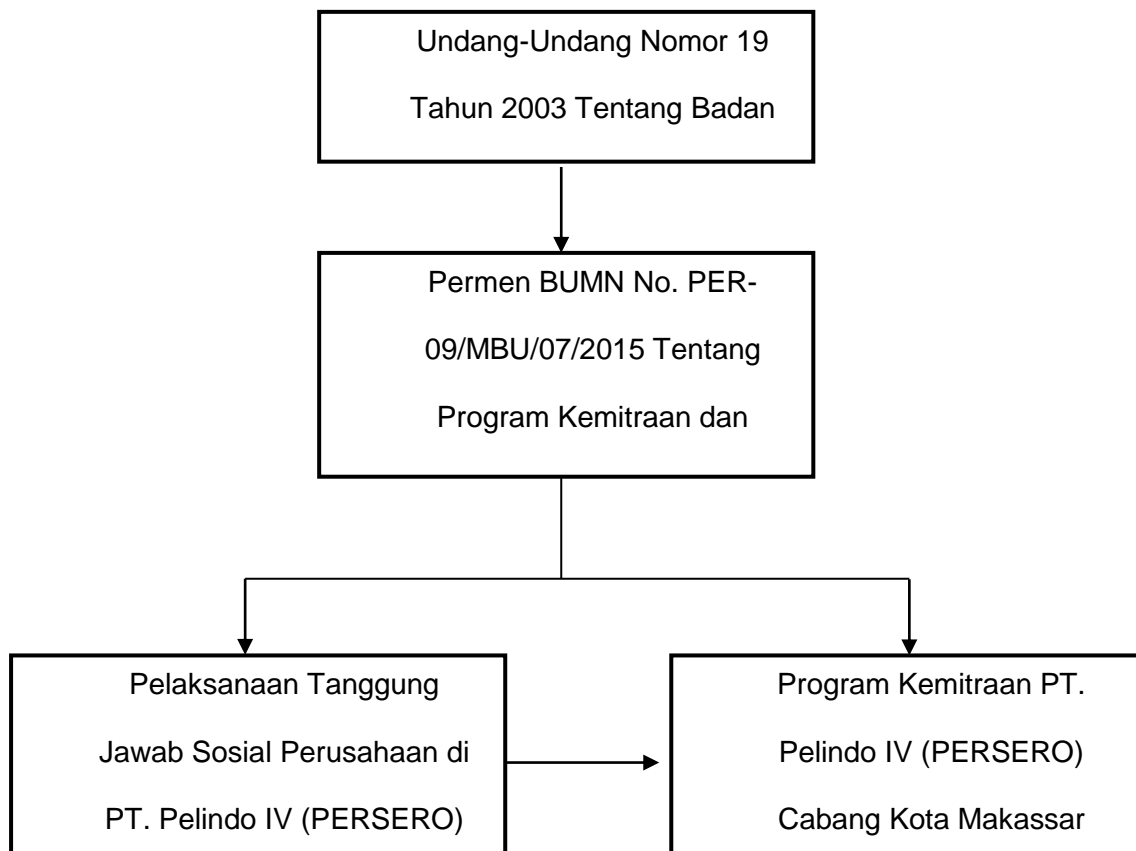
- a. Peminjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Peminjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan Mitra Binaan.

Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL dapat bekerjasama dengan BUMN lain untuk membantu tugas penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut khususnya bagi BUMN Pembina yang tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dan/atau tidak membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL di daerah tersebut.

1. Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak
2. BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan oleh BUMN Pembina lain yang membantu penyaluran tersebut, untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program-program yang ditugaskan.

II.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015. Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rencana kegiatan secara sistematis untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015. Untuk menjelaskan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

III.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, penulis menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015 dan bagaimana pelaksanaannya. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini juga dianggap lebih memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015.

III.2 Desain Penelitian

Adapun desain penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus ialah penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail (Pasolong, 2013:75). Kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015.

III.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, merupakan program untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba yang dihasilkan oleh BUMN. Program kemitraannya disalurkan kepada mitra binaan di sektor usaha kecil di wilayah Kota Makassar. Kesembilan penerima manfaat Program Kemitraan diantaranya, pemilik Toko Intan, Lino Laundry, Usaha Ayam Potong Karkas, Toko Rahayu Ningsih, Mie Ayam Jenggot dan Kedai Batagor “Siomay Bandung”, Toko Musa, Depot Air Minum Isi Ulang “Nurul”, dan Balqis Bakery dan Butik.

III.4 Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi terkait penelitian ini. Pemilihan informan pada penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan yang dimana pemilihannya berdasarkan kemampuan informan yang dianggap paling mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program

Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015.

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Unit pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar.
- 2) Kelompok sasaran/ mitra binaan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar, yaitu: Toko Intan, Lino Laundry, Usaha Ayam Potong Karkas, Toko Rahayu Ningsih, Mie Ayam Jenggot dan Kedai Batagor “Siomay Bandung”, Toko Musa, Depot Air Minum Isi Ulang “Nurul”, dan Balqis Bakery dan Butik.

III.5 Jenis Data

III.5.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015, berapa jumlah dana program kemitraan yang disalurkan sejak tahun 2011-2015, apa saja kegiatannya, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Narasumber/ informan yang dimaksud adalah:

- 1) Unit pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar.
- 2) Kelompok sasaran/ mitra binaan yang meliputi:

Toko Intan, Lino Laundry, Usaha Ayam Potong Karkas, Toko Rahayu Ningsih, Mie Ayam Jenggot dan Kedai Batagor “Siomay Bandung”, Toko Musa, Depot Air Minum Isi Ulang “Nurul”, dan Balqis Bakery dan Butik.

Guna memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara langsung kepada informan.

III.5.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen yang menjelaskan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar dan berapa jumlah penerima dana dari kegiatan tersebut. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen Laporan Tahunan PT. Pelindo IV tahun 2015 yang dimuat dalam website resmi PT. Pelindo IV (Persero).

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengamati, merekam, dan mencatat fenomena atau aktifitas yang sehubungan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Pelaksanaan kegiatan tersebut diamati dimulai dari proses awal seleksi berkas permohonan bantuan hingga pemberian dana kepada masyarakat yang lolos seleksi.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap paling mengetahui dan mampu menjelaskan mengenai

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015. Informan yang dimaksud yaitu, direksi unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV Cabang Kota Makassar.

Selain itu, wawancara dilakukan dengan kelompok sasaran/ mitra binaan yang secara langsung merasakan dan terlibat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Pelindo IV (Persero). Kelompok sasaran dari kegiatan ini, yaitu: pemilik Toko Intan, Lino Laundry, Usaha Ayam Potong Karkas, Toko Rahayu Ningsih, Mie Ayam Jenggol dan Kedai Batagor “Siomay Bandung”, Toko Musa, Depot Air Minum Isi Ulang “Nurul”, dan Balqis Bakery dan Butik.

3. Studi Dokumen

Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa Laporan Tahunan PT. Pelindo IV tahun 2015 yang dimuat dalam website resmi PT. Pelindo IV (Persero).

III.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:91) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung di lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan yang diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Gambaran Umum Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkewajiban ikut berperan serta menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program tersebut dilaksanakan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat khususnya di wilayah sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *stockholders* melainkan pula sebagai *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berperan serta dalam menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek manusia dan lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam pasal 2 ayat (1) e “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Serta pelaksanaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan ini kewajiban pelaksanaan PKBL secara jelas tertuang dalam Bab II pasal 2 ayat (1) “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini”. Serta pasal 2 ayat (2) “ Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. Maka PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengimplementasikan dalam bentuk Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah suatu inisiatif dari perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara untuk merealisasikan upaya tanggung jawab sosial lingkungan melalui arahan dari Kementrian BUMN RI. Program Kemitraan (PK) adalah program yang dilaksanakan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Sedangkan Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

IV.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

1. Maksud

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan PKBL yang *accountable*.

IV.3 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Divisi PKBL adalah unit yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pelaksanaan Program Kemitraan dengan usaha usaha kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. Pelindo IV. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD 20 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), mengatur bahwa PKBL yang sebelumnya berada di bawah Senior Manager Pembendaharaan dan PKBL di ubah menjadi berada di bawah Sekretaris Perusahaan. Berikut merupakan susunan pengurus unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) :

1. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, Administrasi kepegawaian, penilaian kerja pegawai, dan pengelolaan Kantor Pusat.
2. Sekretaris Perusahaan, mempunya fungsi yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi Perseroan, kehumasan, hubungan antar lembaga dan luar negeri, kesekretariatan Direksi, kepatuhan terhadap GCG, dan kegiatan program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sekretaris juga memiliki fungsi menjamin adanya keterbukaan informasi kepada publik. Untuk menyelenggarakan fungsi Sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola kesekretariatan Direksi, rapat Direksi, rapat Komisaris, RUPS, dan kegiatan administrasi Direksi lainnya
- b. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi Perseroan, termasuk komunikasi eksternal , iternal, dan kehumasan
- c. Melaksanakan kegiatan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dari Perseroan
- d. Pengawasan terhadap penerapan GCG
- e. Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Sekretaris perusahaan terdiri dari unit kerja sebagai berikut:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat
 - b. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Monitoring GCG
 - c. Bagian Kemitraan
 - d. Manager Kantor Perwakilan
3. Asisten Sekretaris Perusahaan – Program Kemitraan



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Gambar IV.1 Struktur Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero)

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan secara optimal. Oleh karena itu, ketersediaan aparatur yang memadai serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu kebijakan sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada PT. Pelindo IV (Persero) dapat dilihat dari karakteristik jenis kelamin dan pangkat/golongan melalui tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Karakteristik Staf Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero)

Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase (%) |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 1 | Laki-Laki | 17 Orang | 70.8 |
| 2 | Perempuan | 7 Orang | 29.2 |
| Total | | 24 Orang | 100 |

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sumber daya aparatur pada unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) berjumlah 24 orang. Staf berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17 orang (70.8%) lebih dominan dibandingkan dengan staf berjenis kelamin perempuan dengan jumlah tujuh orang (29.2%).

Tabel IV.2 Karakteristik Staf Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero)

Berdasarkan Pangkat/ Golongan

| No | Pangkat/ Golongan | A | B | C | D | Jumlah | Presentase (%) |
|--------|----------------------|---|---|---|----|--------|-------------------|
| 1 | IV | - | 1 | - | - | 1 | 4.1 |
| 2 | III | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 66.7 |
| 3 | II | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 25 |
| 4 | I | - | - | - | 1 | 1 | 4.1 |
| Jumlah | | 5 | 3 | 6 | 10 | 24 | 100 |

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui staf unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) memiliki staf dengan pangkat/golongan I yakni satu orang (4.1%), staf dengan pangkat/golongan II sebanyak enam orang (25%), pangkat/golongan III sebanyak 16 orang (66,7%), dan staf dengan pangkat/golongan IV yakni satu orang (4,1%).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud yaitu hasil wawancara pada pihak-pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah dalam fokus penelitian. Selain itu dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar.

V.1 Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melaksanakan Program Kemitraannya sebagai bentuk dukungan bagi perkembangan dan peningkatan kompetensi usaha kecil yang merupakan roda penggerak perekonomian bangsa. Program Kemitraan dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tujuan yang paling esensial adalah membantu upaya Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, Program Kemitraan berpotensi membuka akses keluarga miskin kepada sumber daya finansial, perluasan produksi dan pemasaran sehingga nantinya masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ekonominya. Dengan Program Kemitraan masyarakat dapat memperoleh

pinjaman modal usaha, mendapatkan pembinaan dan promosi dari usaha besar.

Program Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama yang pada akhirnya akan memantapkan struktur perekonomian dan pembangunan ekonomi nasional.

Melalui Program Kemitraan, PT. Pelindo IV (Persero) berupaya untuk mengembangkan usaha kecil sehingga mampu menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pinjaman dan pendidikan/pelatihan serta pendampingan usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil. Pinjaman Program Kemitraan PT. Pelindo IV adalah sebuah program pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil yang belum *bankable* namun mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga lebih produktif. Jangka waktu pinjaman 30 bulan termasuk masa tenggang angsuran pokok selama tiga bulan sejak diterimanya pinjaman. Walaupun bersifat non-komersial, pinjaman program Kemitraan bukanlah hibah. Pinjaman tersebut harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengembalian pinjaman dilakukan secara berangsur selama masa perjanjian. Angsuran pinjaman harus dibayarkan maksimal tiga bulan setelah waktu perjanjian. Oleh karena itu, proses pemberian pinjaman tetap melalui mekanisme seleksi dan penyaluran yang baik.

Para pengusaha kecil yang terlibat diperlakukan sejajar sebagai Mitra Binaan. Melalui pinjaman kemitraan dan pembinaan yang diberikan,

diharapkan para Mitra Binaan tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang dan lebih produktif.

V.1.1 Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan

Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015

Pelaksanaan program Kemitraan didasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dipertanggung jawabkan dalam laporan berkala triwulan dan tahunan. *Standard Operating Procedure* (SOP) disusun sejalan dengan pengelolaan resiko operasional dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. SOP ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan keputusan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Tahapan prosedur program Kemitraan PT. Pelindo IV (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Proposal Program Kemitraan

Usaha kecil yang berkeinginan menjadi Mitra Binaan harus mengajukan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha dengan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat usaha
- b. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
- c. Bukti identitas diri pemilik/pengurus
- d. Bidang usaha
- e. Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang
- f. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)

- g. Rencana usaha dan kebutuhan dana
- h. Surat pernyataan pra Mitra Binaan, sedikitnya memuat:
 - 1) Tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain
 - 2) Kesanggupan jika mendapat dana PK, antara lain:
 - a) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan/atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina
 - b) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina
 - c) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodic kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian
- i. Denah dan foto lokasi dan/atau produk usaha
- j. Lampiran foto copy:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 2) KTP penanggung jawab berikutnya/ahli waris
 - 3) Kartu Keluarga
 - 4) Surat Nikah
 - 5) Perikatan (surat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dengan usia kendaraan maksimal 3 tahun beserta STNK)
 - 6) Rekening listrik rumah tinggal (3 bulan terakhir)
 - 7) Rekening Bank
 - 8) Bagi Koperasi/kelompok melengkapi foto copy SITU/SIUP, NPWP, AKte Pendirian, Akte Badan Hukum, Akte Notaris, Sertifikat, Surat Keterangan Kepada Desa/Lurah, Susunan Pengurus dan nama serta fotocopy KTP

masing-masing anggota pengurus, tidak termasuk Koperasi yang bergerak di bidang Simpan Pinjam.

Pengajuan proposal merupakan tahap awal bagi calon Usaha Kecil dan Menengah yang ingin menjadi Mitra Binaan PT. Pelindo IV (Persero). Hal tersebut diungkapkan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Pada tahap awal seleksi, kita mewajibkan bagi para calon Mitra Binaan untuk mengajukan proposal yang isinya itu data diri calon Mitra Binaan hingga data kegiatan usahanya yang nantinya akan diseleksi kembali. Jadi, tahap ini merupakan tahap penentu bagi calon Mitra Binaan, ya kalau sesuai kami lanjutkan, ya kalau tidak berarti kita tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh IL selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar :

“Semua proposal yang telah diajukan oleh calon Mitra Binaan di Kantor Pusat diteruskan kesini. Nanti kami yang akan memeriksa kelayakan berkas-berkas proposal yang telah diajukan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat tahap awal prosedur Program Kemitraan yaitu mengajukan proposal kegiatan usaha ke Unit PKBL Kantor Pusat. Kemudian proposal yang telah diajukan kemudian diteruskan ke Unit PKBL Kantor Cabang Penyalur. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilaksanakan Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

2. Seleksi Administrasi

Seluruh berkas proposal yang diajukan oleh calon Mitra Binaan kemudian diseleksi oleh tim PKBL Kantor Cabang dengan menginput data proposal dan

mengevaluasi seluruh kelengkapannya. Hal tersebut diungkapkan oleh AFR selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Kota Makassar:

“Seluruh proposal kegiatan usaha yang telah distor di unitk PKBL Kantor Pusat kemudian diserahkan kepada kami untuk diseleksi. Kami mengevaluasi seluruh kelengkapan berkas yang telah dimasukkan. Dicek kembali apakah berkas yang dimasukkan telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan apakah layak untuk diteruskan ke tahap berikutnya.”

Penginputan berkas Calon Mitra Binaan dilakukan untuk memudahkan tim seleksi mengevaluasi berkas proposal yang telah diajukan. Hal tersebut diungkapkan oleh S selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar :

“Proposal yang telah diajukan kita input ke dalam laporan tahunan kita, setelah itu kita mengevaluasi kelayakan berkas lalu diseleksi lagi supaya lebih pasti siapa saja yang memang betul-betul layak untuk diikutkan ke tahap selanjutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahap seleksi Unit PKBL Kantor Cabang melakukan evaluasi kelayakan berkas. Berkas yang dianggap layak dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan kemudian diikutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

3. Survei

Survei dilakukan oleh tim surveyor dari unit PKBL PT. Pelindo IV yang bertujuan untuk memastikan dan melihat kesesuaian antara isi formulir pendaftaran dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan (verifikasi). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Survei itu dilakukan biar kita bisa lihat informasi-informasi di dalam proposal yang sudah diajukan apakah benar-benar sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Kan bisa saja ada rekayasa data dan informasi yang diberikan oleh calon Mitra Binaan, mana kita tau kan.”

Survei yang dilakukan berupa observasi langsung dan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang calon Mitra Binaan terutama yang berkaitan dengan *Personality 5C* (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic* dan *Collateral*) dan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk menilai layak dan besarnya kebutuhan calon Mitra Binaan. Hal ini disampaikan oleh bapak AS selaku tim surveyor Unit PKBL:

“Dalam melaksanakan survei kita turun langsung ke lapangan. Yang akan kita nilai itu *Personality 5C*nya. Jadi untuk mendapatkan data itu kita lakukan observasi langsung ditempat usaha, kita juga mewawancarai pemilik usaha hingga tetangga sekitar tempat usaha calon Mitra Binaan demi mendapatkan data yang objektif, tidak ada rekayasa dalam pemberian informasi.”

Demikian pula yang diungkapkan oleh RI selaku pemilik Toko Intan:

“Sesudah saya masukkan proposalku di Pelindo, datang sekitar tiga orang katanya dari Pelindo mau adakan observasi. Mereka bilang mau lihat-lihat toko, ada juga yang tanya-tanya wawancara begitu. Dia juga tanya-tanya tetangga disekitar sini.”

Diwawancara di tempat berbeda SHD selaku pemilik Lino Laundry mengungkapkan bahwa:

“Pernah ada dari pegawai Pelindo datang ke toko katanya mau observasi keadaan toko, ada juga wawancara ditanya-tanya tentang usaha laundry ini. Keluarga yang ada disini juga di wawancarai sampai ke tetangga-tetangga.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh M selaku pemilik Toko Musa:

“Observasi sudah pernah diadakan, pegawainya datang ke toko cek-cek keadaan toko sambil tanya-tanya tentang usaha toko saya sampai pertanyaan-pertanyaan pribadi. Keluagra yang ada di toko sama tetangga-tetangga juga ditanya-tanya katanya untuk penilaian.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa survei yang dilaksanakan oleh unit PKBL PT. Pelindo IV dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara isi proposal yang diajukan oleh calon Mitra Binaan dengan

keadaan yang ada di lapangan. Survei yang dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Penilaian

Setelah dilakukan survei, selanjutnya hasil survei dinilai dan dievaluasi. Dimana terdapat formulir analisis survei berisi kesesuaian antara data di proposal sebelumnya dengan keadaan nyata di lapangan. selanjutnya, dilakukan penilaian dalam bentuk angka. Hal tersebut diungkapkan oleh KR selaku evaluator Unit PKBL Kantor Cabang Makassar :

“Hasil survei yang sudah dilakukan kemudian kita evaluasi kembali. Caranya itu kita nilai berapa tingkat kesesuaian proposal calon Mitra Binaan dengan keadaan yang terjadi di lapangan saat dievaluasi. Jadi ada beberapa aspek yang kita nilai, kalo kita disini sebut *Personality (5C)*. Terus lihat siapa saja yang paling mendekati total nilai yang sudah ditetapkan, itulah yang kemudian dinyatakan layak untuk diikuti ke tahap selanjutnya.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh RS selaku evaluator Unit PKBL Kantor Cabang Makassar :

“Kami punya formulir penilaian khusus yang kami pakai untuk menilai sesuai tidaknya proposal yang diajukan dengan keadaan sebenarnya. Karena banyak kita temukan sebelumnya di dalam proposal itu informasinya direkayasa, pas dilakukan observasi eh ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kami evaluasi kembali dengan berpedoman pada formulir analisis yang sudah ditetapkan. Dalam formulir itu sudah ada skor yang ditetapkan, skornya itu 10-25 dengan hasil akhir 100. Kalau calon Mitra Binaan dianggap memenuhi skor yang sudah kami tetapkan, berarti kami nyatakan lolos dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, begitu juga sebaliknya kalau tidak memenuhi skor berarti tidak masuk kriteria.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bentuk penilaian yang dilakukan yaitu dengan menilai *Personality 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral)* masing-masing calon Mitra Binaan. Hasil akhir nilai dari *Personality 5C* masing-masing bernilai 100 dengan bobot antara 10-25. Calon

Mitra Binaan yang dianggap paling mendekati nilai yang telah ditetapkan itulah yang kemudian dinyatakan layak untuk diikutkan ke tahap selanjutnya.

5. Analisa Kelayakan

Selanjutnya pihak PT. Pelindo IV menentukan siapa saja yang berhak menjadi Mitra Binaan dan menganalisa kelayakan calon Mitra Binaan. Analisa dilakukan dengan melakukan penilaian P 5C (*Personality, Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral*), yaitu:

- a. *Personality*, meliputi: umur, pendidikan, status tempat tinggal, status perkawinan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan.
- b. *Character*, merupakan cara penilaian untuk mengukur kemauan untuk membayar (*willingness to pay*), dengan meneliti kebiasaan sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat.
- c. *Capacity*, merupakan suatu cara penilaian untuk mengukur kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dengan meneliti calon Mitra Binaan sebagai berikut:
 - 1) Pengalaman berbisnis yang dihubungkan dengan pendidikan umum atau kejuruan Mitra Binaan.
 - 2) Pengalaman bisnis dalam menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi, ketentuan pemerintah dan mengikuti perkembangan teknologi serta sistem modern.
 - 3) Bagaimana kekuatan usaha Calon Mitra Binaan sekarang dalam sector usaha yang berjalan.
- d. *Capital*, merupakan suatu cara penilaian untuk mengukur kemampuan modal calon Mitra Binaan dengan meneliti laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi

- e. *Condition of Economic*, merupakan cara penilaian untuk mengukur nilai pinjaman yang ditentukan dengan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha yang disebabkan adanya persaingan perdagangan sector usaha, sehingga pinjaman akan memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha calon Mitra Binaan.
- f. *Collateral*, merupakan usaha untuk mengurangi resiko kerugian tidak kembalinya pinjaman yang diberikan, bila ada kesangsian agar dilakukan pendekatan secara baik kepada calon Mitra Binaan dengan memberikan jaminan.

Unit PKBL Kantor Pusat kemudian melakukan evaluasi dan verifikasi usulan daftar calon Mitra Binaan dari Kantor Cabang Penyalur. Hal ini disampaikan oleh SH selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Setelah usulan daftar calon Mitra Binaan di bawa Kantor Cabang, selanjutnya dievaluasi dan dianalisa lagi kelayakan setiap calon Mitra Binaan. Kami melakukan evaluasi supaya nantinya Mitra Binaan yang lolos betul-betul layak untuk menerima dana bantuan dari kami. Evaluasi benar-benar dilakukan secara ketat memakai skala Likert 1-5, *Personality* 5Cnya dievaluasi kembali. Kalau skornya mendekati batasan minimal yah kita lanjutkan ke tahap berikutnya, tapi kalau tidak yah kita berhenti dalam artian ditolak.”

Evaluasi yang dilakukan bersifat kualitatif, agar tidak menimbulkan aspek subyektifitas maka informasi kualitatif dirubah menjadi data kuantitatif menggunakan skala Likert dengan rentang 1-5 karena dipandang dapat mewakili tingkat intensitas penilaian dengan baik. Adapun urutan evaluasi sebagai berikut:

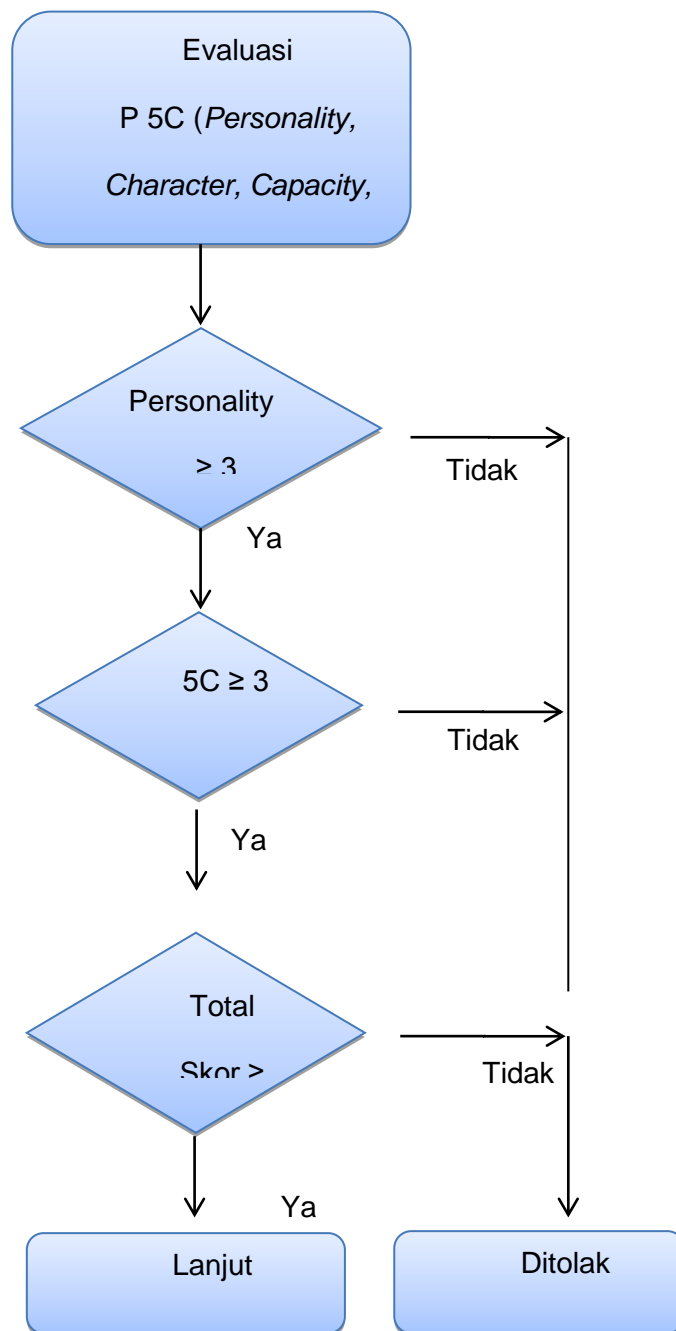
- a. Apabila calon Mitra Binaan pada evaluasi *personality* tidak memenuhi batasan minimal maka evaluasi di tolak. Apabila memenuhi batasan minimal proses evaluasi dilanjutkan pada 5C.

- b. Apabila calon Mitra Binaan pada evaluasi 5C terdapat skor yang tidak memenuhi batasan minimal maka evaluasi dihentikan dan proposal pengajuan di tolak. Apabila memenuhi batasan minimal proses evaluasi dilanjutkan.
- c. Apabila total skor calon Mitra Binaan tidak memenuhi batasan minimal maka evaluasi dihentikan dan proposal pengajuan di tolak. Apabila memenuhi batasan minimal, proses evaluasi dilanjutkan pada proses penentuan besarnya pinjaman.

Hasil evaluasi dan analisa kelayakan kemudian disampaikan ke Direktur Pembina untuk dilakukan persetujuan. Hal ini diungkapkan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) Kantor Cabang Makassar:

“Setelah kami memberikan usulan daftar calon Mitra Binaan, selanjutnya Kantor Pusat yang akan mengevaluasi dan menganalisis lagi kelayakan setiap calon Mitra Binaan. Kalau sudah dianalisis kemudian hasilnya dibawa ke Direktur Pembina yang nantinya akan disetujui atau ditolak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa setelah Unit PKBL Kantor Cabang menetapkan usulan daftar calon Mitra Binaan, kemudian usulan tersebut dibawa ke Unit PKBL Kantor Pusat untuk dievaluasi kembali dan dilakukan analisis kelayakan setiap calon Mitra Binaan. Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Direktur Pembina untuk dilakukan persetujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses analisa kelayakan dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Gambar V.1 Bagan Alur Analisa Kelayakan Calon Mitra Binaan

Pada gambar di atas, proses dalam analisa kelayakan Mitra Binaan di mulai dengan mengevaluasi P 5C (*Personality, Character, Capacity, Capital,*

Condition of Economic dan *Collateral*) setiap Mitra Binaan. Proses penilaian dapat diteruskan apabila sub total nilai *Personality*, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economic* dan *Collateral* minimal 3. Apa bila tidak memenuhi nilai yang telah ditetapkan maka proses penilaian tidak dapat dilanjutkan atau di tolak. Tahap berikutnya, seluruh nilai *Personality* 5C di totalkan dan nilai minimal yang harus dicapai yaitu 60 agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

6. Penetapan Kelayakan dan Besaran Pinjaman

Keputusan untuk memutuskan proposal pengajuan pinjaman yang diajukan oleh calon Mitra Binaan tergantung pada hasil evaluasi *Personality* 5C dan hasil evaluasi pertumbuhan dan prospek usaha. Pada tahapan ini yang menjadi kunci utama sebelum memutuskan besaran yang wajar kebutuhan pinjaman untuk calon Mitra Binaan adalah berdasarkan analisis terhadap pertumbuhan usaha calon Mitra Binaan selama satu tahun terakhir dan prospeknya. Apabila pertumbuhan calon Mitra Binaan selama satu tahun terakhir mengalami penurunan lebih dari 10%, atau berdasarkan hasil survey di lapangan kondisi usaha calon Mitra Binaan tidak memiliki prospek untuk berkembang maka proposal pengajuan pinjaman ditolak. Hal ini diungkapkan oleh HGM selaku staf unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Sebelum ditetapkan berapa besaran pinjaman yang layak diberikan bagi Mitra Binaan, kami terlebih dahulu menganalisis bagaimana pertumbuhan dan prospek usaha para calon Mitra Binaan. Kalau kondisi usaha calon Mitra Binaan dianggap tidak memiliki prospek untuk berkembang dan mengalami penurunan, berarti usahanya dianggap tidak layak untuk mendapatkan pinjaman.”

Hal sama juga diungkapkan oleh S selaku staf unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Kroscek data juga kami lakukan mulai dari pengajuan hingga hasil survey kita cek semua. Kita juga analisa pendapatannya berapa dan kesanggupan pinjaman yang dipinjam berapa. Nanti itu yang dihitung untuk ditetapkan berapa besar pinjaman yang akan dikasi.”

Berdasarkan hasil survey *Personality* 5C, pertumbuhan dan prospek usaha calon mitra binaan yang layak mendapat pinjaman, maka penentuan besarnya pinjaman dihitung dengan rumus:

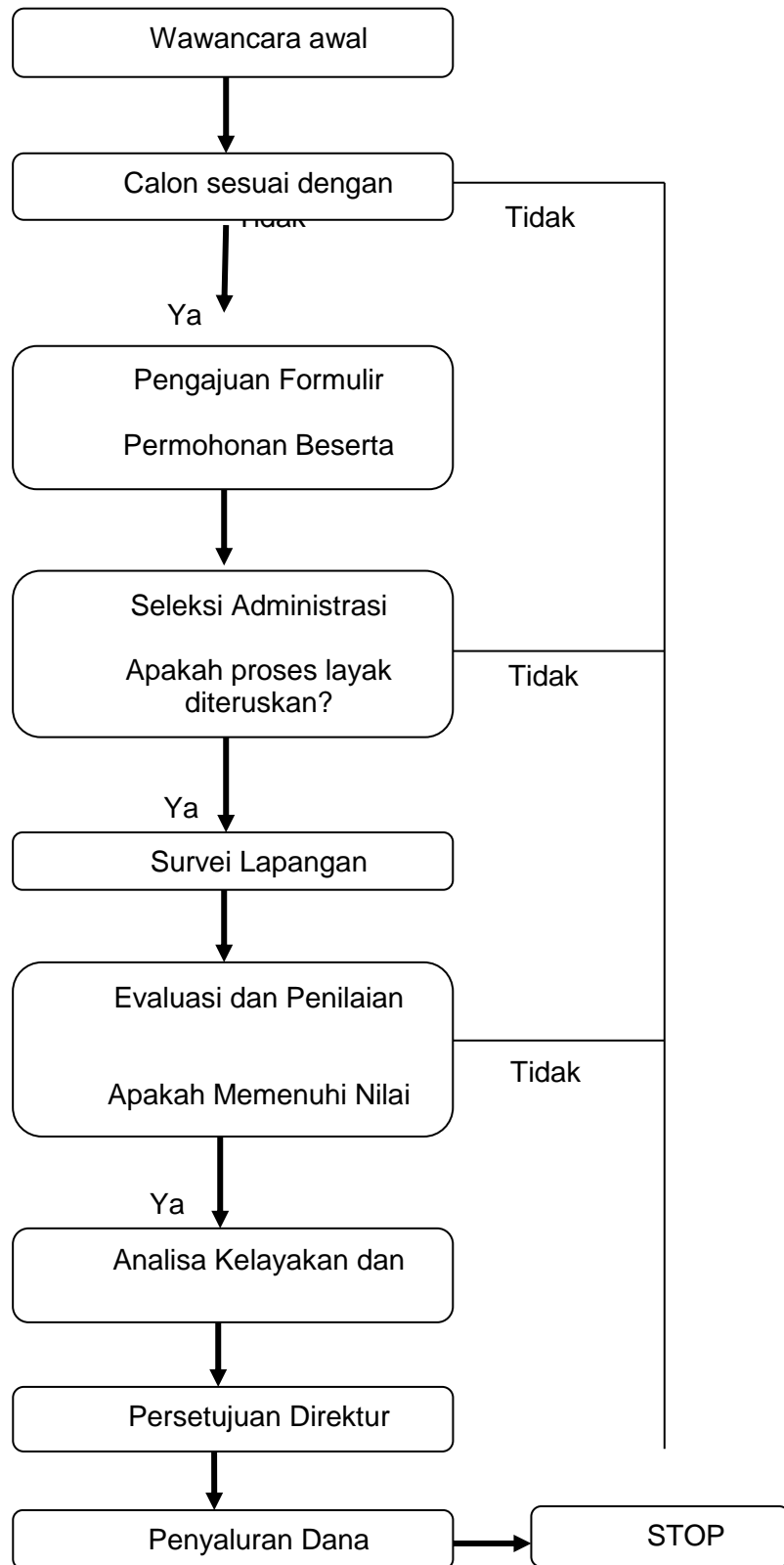
$$\begin{array}{|c|} \hline \text{HASIL EVALUASI} \\ \hline \text{KFI AYAKAN} \\ \hline \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{HASIL PENENTUAN} \\ \hline \text{BESARNYA} \\ \hline \end{array}$$

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Gambar V.2 Rumus Menentukan Besaran Pinjaman

Dalam contoh, skor hasil evaluasi kelayakan pinjaman adalah 65,85% dikalikan dengan hasil evaluasi besarnya pinjaman adalah Rp. 3.810.000, maka hasil pinjaman yang disetujui untuk disalurkan kepada Mitra Binaan adalah Rp. 2.508.885.

Prosedur pengajuan pinjaman oleh Calon Mitra Binaan hingga penyerahan pinjaman kepada Mitra Binaan dapat digambarkan melalui *flowchart* di bawah ini:



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Gambar V.3 Prosedur Pengajuan Pinjaman dan Penyaluran Dana Kemitraan

V.1.2 Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar

Setelah unit PKBL Kantor Pusat menetapkan kelayakan dan besaran pinjaman calon Mitra Binaan, hasil yang telah ditetapkan kemudian diserahkan kepada Direktur Pembina untuk disetujui. Setelah adanya persetujuan dari Direktur Pembina, unit PKBL Kantor Pusat kemudian menyampaikan hasil persetujuan tersebut kepada unit PKBL Kantor Cabang guna realisasi penyaluran. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembina, Kantor Cabang penyalur kemudian membuat surat perjanjian pinjaman dengan Mitra Binaan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat perusahaan Mitra Binaan
- b. Hak dan kewajiban perusahaan dan Mitra Binaan
- c. Jumlah pinjaman dan peruntukannya
- d. Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok, dan jasa administrasi pinjaman)
- e. Jangka waktu pinjaman (maksimum selama 36 bulan)

Pada tahap akhir, setelah perjanjian ditanda tangani dan dokumen pendukung telah lengkap, Cabang Penyalur melakukan transfer dana Program Kemitraan ke rekening bank Mitra Binaan. Hal ini sebagaimana penuturan DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) Kantor Cabang Makassar:

“Penyaluran dana Kemitraannya itu disalurkan secara langsung oleh perusahaan melalui kantor cabang. Tapi harus ada persetujuan dari Direktur Pembina dulu untuk realisasi penyaluran. Setelah adanya persetujuan dari Direktur Pembina, barulah Kantor Cabang membuat surat perjanjian pinjaman dengan Mitra Binaan. Kalau surat perjanjian sudah ditanda tangani dan semua berkas dinyatakan lengkap barulah dana pinjaman disalurkan oleh Kantor Cabang kepada Mitra Binaan melalui rekening Mitra Binaan”.

Hal yang senada diungkapkan oleh I selaku pemilik Depot Air Minum Isi

Ulang “Nurul” yang mengatakan bahwa:

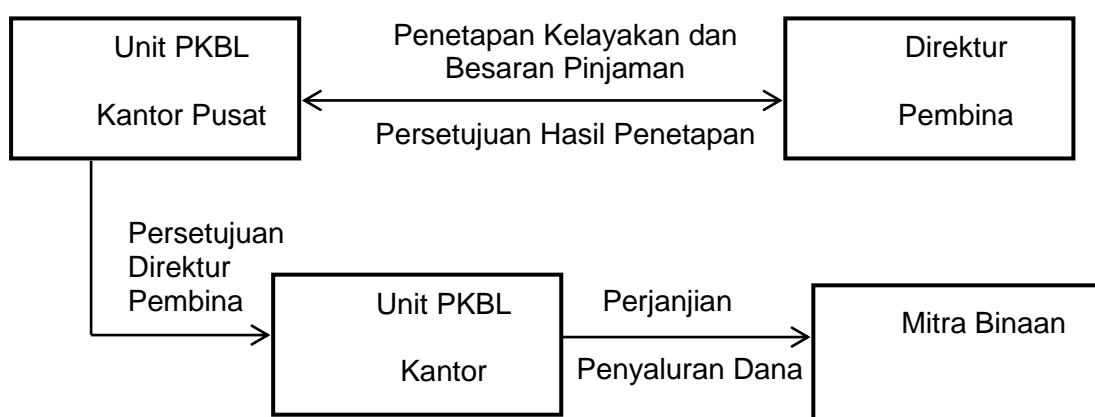
“Saya terima dananya itu dari bank, mereka transfer langsung ke rekening saya. Kan sebelumnya waktu ajukan proposal ada diminta nomor rekening yang punya usaha, jadi uangnya ditransfer kesitu. Tidak dikasi langsung sama pegawainya.”

Diwawancara di tempat berbeda, D selaku pemilik Toko Rahayu Ningsih

mengutarakan hal yang sama:

“Waktu itu saya dikasi tau dari Pelindo katanya lolos jadi Mitra Binaannya, terus itu dananya dikasi lewat rekening. Pelindo transfer langsung ke rekening ku jadi tidak dikasi langsung uangnya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa setelah Direktur Pembina menyetujui besaran pinjaman yang akan disalurkan, unit PKBL Kantor Pusat kemudian menyampaikan hasil persetujuan tersebut kepada unit PKBL Kantor Cabang guna realisasi penyaluran dan kemudian membuat surat perjanjian pinjaman dengan Mitra Binaan. Setelah semua berkas dinyatakan telah lengkap, dana pinjaman kemudian disalurkan melalui rekening Mitra Binaan.



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Gambar V.4 Alur Penyaluran Dana Program Kemitraan

V.1.3 Mekanisme Peminjaman dan Penagihan Dana Program Kemitraan PT.

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar

Pinjaman dana Program Kemitraan PT. Pelindo IV adalah fasilitas pinjaman untuk kebutuhan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada Mitra Binaan. Pinjaman Program Kemitraan bukanlah hibah, pinjaman harus tetap dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sesuai dengan hal tersebut, maka kualitas pinjaman yang diberikan kepada Mitra Binaan harus sangat diperhatikan. Hal ini karena apabila kualitas pinjaman Mitra Binaan kurang baik maka akan berpengaruh terhadap pembayaran pinjaman pokok dan jasa administrasi Program Kemitraan. Hal ini dituturkan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL PT.

Pelindo IV (Persero) Kantor Cabang Makassar :

“Yang perlu diketahui oleh Mitra Binaan bahwa dana Program Kemitraan itu bukan dana bantuan, tapi dana pinjaman jadi harus dikembalikan sesuai waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Kita juga menilai kualitas pinjaman dari Mitra Binaan tergantung dari bagaimana kelancaran Mitra Binaan dalam melakukan kewajibannya atau dalam hal ini mengembalikan dana yang sudah diberikan. Kalo kualitasnya bagus berarti Mitra Binaan lancar dalam membayarkan pokok serta jasa administrasinya, nah begitu sebaliknya.”

Klasifikasi kualitas pinjaman dana Program Kemitraan ditentukan berdasarkan kemampuan Mitra Binaan dalam memenuhi kewajibannya berupa angsuran pokok dan beban administrasi sesuai perjanjian yang disepakati. Adapun klasifikasi kualitas pinjaman secara internal yang ditetapkan dalam SOP PKBL PT. Pelindo IV adalah sebagai berikut:

1. Kualitas 1 – Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa

administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2. Kualitas 2 – Kurang Lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

3. Kualitas 3 – Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang melampaui 180 (seratus delapan puluh) dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Kualitas 4 – Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Setelah dana pinjaman Program Kemitraan telah disalurkan, kemudian Kantor Cabang Penyalur melakukan penagihan angsuran pokok dan jasa administrasi. Penagihan pinjaman dilakukan untuk menaikkan saldo pinjaman. Kantor Cabang Penyalur dapat melakukan penagihan kepada Mitra Binaan atau penjamin berdasarkan perjanjian tambahan dengan cara penagihan langsung melalui telepon, SMS, dan kunjungan lapangan. Dapat juga dilakukan penagihan

secara tidak langsung dengan memberikan surat pemberitahuan dan panggilan. Penagihan dilakukan 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran. Hal tersebut diungkapkan oleh R selaku Staf Unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) Kantor Cabang Makassar:

“selama ini banyak sekali Mitra Binaan yang tidak sadar dengan kewajibannya sendiri, banyak yang tidak berinisiatif sendiri untuk mengembalikan dana pinjaman yang sudah diberikan. Jadi kita atasi itu dengan cara menagih langsung lewat sms, telepon atau didatangi langsung. Kalau sudah ditagih langsung tapi angsuran pinjaman juga belum dibayarkan ya terpaksa kita keluarkan surat peringatan.”

Pendapat tersebut diperjelas oleh AL selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Dalam melakukan penagihan kita lakukan beberapa cara mulai dari penagihan langsung sampai secara tidak langsung, yang terakhir itu kita keluarkan surat peringatan. Tapi kalau surat peringatan sudah kita keluarkan dan tidak ada itikad baik Mitra Binaan untuk mengembalikan, kemudian kita lakukan monitoring atau evaluasi Mitra Binaan atau Penjamin yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk dilakukan proses pemulihan pinjaman.”

Apabila penagihan langsung dan tidak langsung telah dilakukan, namun Mitra Binaan atau Penjamin tidak juga membayar kewajibannya, maka Kantor Cabang Penyalur dapat mengeluarkan surat peringatan kepada Mitra Binaan atau penjamin.

a. Surat Peringatan I (Pertama)

Surat Peringatan pertama dikeluarkan apabila Mitra Binaan atau Penjamin belum menyelesaikan pembayaran tunggaknya pada minggu pertama bulan kedua tunggakan.

b. Surat Peringatan II (Kedua)

Apabila pada minggu ketiga bulan kedua Mitra Binaan belum membayar kewajibannya, maka Kantor Cabang Penyalur dapat mengeluarkan Surat Peringatan II.

c. Surat Peringatan III (Ketiga)

Apabila pada minggu pertama bulan ketiga Mitra Binaan belum juga membayar kewajibannya, maka diberikan Surat Peringatan III.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kualitas pinjaman Mitra Binaan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan Mitra Binaan dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pokok dan beban administrasi sesuai perjanjian yang disepakati. Penagihan pinjaman oleh Unit PKBL Kantor Cabang dilakukan dengan cara penagihan langsung melalui telepon, SMS, dan kunjungan lapangan. Dapat juga dilakukan penagihan secara tidak langsung dengan memberikan surat pemberitahuan dan panggilan. Penagihan dilakukan lima hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran. Setelah dilakukan penagihan langsung dan tidak langsung, serta pemberian Surat Peringatan namun Mitra Binaan atau Penjamin tidak membayar kewajibannya maka dilakukan monitoring serta evaluasi kondisi Mitra Binaan atau Penjamin untuk dilakukan upaya pemulihan.

V.1.4 Mekanisme Pemulihan Pinjaman Bermasalah Program Kemitraan PT.

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar

Untuk penyelesaian pinjaman yang bermasalah atau dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*). Proses pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali

(*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
- b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
- c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memulihkan pinjaman yaitu pertama, dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Perubahan syarat pembiayaan yang dapat menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan besar angsuran. Kedua, dengan cara penyesuaian persyaratan (*reconditioning*). Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan besaran pinjaman. Dalam hal dilakukan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo disesuaikan dengan sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi. Namun, tindakan ini dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dapat dikecualikan apabila bila piutang macet terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure*) misalnya, Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau usaha yang dijalankan akibat bencana alam/kerusakan. Namun, apabila pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak

terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. Kemudian tata cara penghapus bukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Hal tersebut disampaikan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL PT.

Pelindo IV (Persero) Kantor Cabang Makassar:

“Hampir setiap tahun kita menemukan Mitra Binaan yang bermasalah dalam mengembalikan pinjaman, kalau ditagih pasti punya seribu satu alasan. Jadi untuk mengatasinya kita lakukan penjadwalan kembali, kita menjadwalkan ulang jadwal pembayaran dan waktu masa tenggangnya. Kita juga lakukan penyesuaian persyaratan, jadi semua persyaratan-persyaratan yang disetujui sebelumnya kita rubah kembali sesuai kemampuan Mitra Binaan. Kita tidak bisa merubah besarnya pinjaman yang harus dibayarkan kita cuma merubah syarat-syarat dan penjadwalan pengembalian dananya.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh R selaku Staf Unit PKBL PT. Pelindo

IV (Persero) Kantor Cabang Makassar:

“Masalah dalam melaksanakan Program Kemitraan ini setiap tahun hampir sama, susahnya Mitra Binaan membayarkan angsuran pinjaman. Kita selalu mendatangi langsung untuk menagih yah tapi kalau memang tidak ada niatnya untuk membayar kita tidak dapat apa-apa cuma capek-capek saja keliling menagih. Belum lagi biaya transportasi yang harus kita keluarkan untuk menagih, jadinya kita rugi dua kali. Hampir setiap tahun kita rasakan hal seperti itu.”

AL selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar juga mengungkapkan

hal yang sama:

“Masalah yang paling sulit itu saat penagihan angsuran baik angsuran pokok ataupun angsuran administrasi. Kalau dilakukan penagihan pasti yang didapat itu cuma janji-janji, nyatanya sampai selesai masa perjanjian belum juga dibayarkan. Ada juga Mitra Binaan yang membayar angsurannya tapi tidak lunas sampai habis masa perjanjian. Tapi tidak semua Mitra Binaan yang seperti itu banyak juga yang masih sadar dengan kewajibannya. Kita juga kesulitan kalau mau memproses secara hukum karena kita tidak di *back up* sama pemerintah, belum ada aturan atau sanksi yang mengatur. Kita juga tidak bisa menyita harta benda Mitra Binaan karena kita bukan badan keuangan seperti Bank. Jadi banyak Mitra Binaan yang menganggap surat tanah atau BPKB yang distor saat memasukkan proposal usaha itu cuma formalitas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk penyelesaian pinjaman yang bermasalah dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*). Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan yaitu tidak adanya itikat baik Mitra Binaan dalam membayarkan atau melunasi angsuran pokok dana jasa administrasi. Selain itu, tidak adanya regulasi yang mengatur masalah tersebut.

V.1.5 Mekanisme Pembinaan Mitra Binaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar

Pembinaan kepada Mitra Binaan menyangkut segala aspek yang ditetapkan. Pembinaan dilakukan sejak calon Mitra Binaan menandatangani perjanjian hingga berakhirnya kewajiban yang diperjanjikan. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengikut sertakan Mitra Binaan dalam kesempatan pengembangan diri, produksi, pemasaran, dan pendanaan dengan inisiatif BUMN Pembina. Pembinaan juga dilakukan secara pasif yang dimana pembinaan dilakukan atas inisiatif dari Mitra Binaan melalui permohonan tertulis yang diajukan oleh Mitra Binaan. Seperti yang dijelaskan oleh Z selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Setelah Mitra Binaan ditetapkan, kemudian kami melakukan pembinaan seperti mengadakan pameran untuk mempromosikan hasil produksi Mitra Binaan. Biasanya itu dalam bentuk makanan, kerajinan tangan, dan jasa. Kami juga buka kesempatan bagi Mitra Binaan untuk memberikan masukan pembinaan seperti apa yang diinginkan, tidak terus menerus hanya inisiatif dari kami agar pembinaan yang dilaksanakan lebih efektif bagi Mitra Binaan.

Selain itu, perusahaan juga melakukan pembinaan berkelanjutan. Agar peran perusahaan lebih nyata dalam meningkatkan peran usaha kecil, maka

pembinaan tidak hanya dilakukan selama Mitra Binaan terikat dalam perjanjian. Pembinaan dapat dilakukan secara terus menerus kepada Mitra Binaan meskipun Mitra Binaan telah berakhir perjanjiannya. Sehingga hasil binaan perusahaan dapat terus tumbuh kembang menjadi lebih kuat dan lebih baik yang pada dasarnya akan memperkuat sektor ekonomi dan sosial bangsa.

Perusahaan juga memberikan *award* kepada Mitra Binaan yang dilakukan setiap tahun berdasarkan kriteria atau nilai tertentu setelah dilakukan penilaian oleh BUMN Pembina menurut kategori tertentu, misalnya: kerajinan, handycraft, konveksi, makanan, jasa, dan lain-lain. Hal ini diungkapkan oleh SB, selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar yang mengatakan bahwa:

“Pembinaan yang kami lakukan ini tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk Mitra Binaan. Pada tahun 2015 ini, kami melaksanakan kegiatan pameran dengan mengajak Mitra Binaan turut serta dalam memamerkan produksi usahanya. Kami juga berusaha tetap melakukan pembinaan walaupun masa perjanjiannya telah selesai. Ada juga semacam penghargaan yang diberikan bagi Mitra Binaan yang punya prestasi.”

Diwawancarai di tempat berbeda, RA selaku pemilik Kedai Batagor “Siomay Bandung” mengatakan hal yang berbeda:

“Pernah satu kali saya diundang diacaranya PT. Pelindo acara pameran. Disana ada beberapa jenis makanan saya agak lupa termasuk siomay saya dipamerkan disana. Kalau penghargaan selama ini belum pernah ada saya terima”

Hal yang sama diungkapkan oleh BU selaku pemilik Toko Balqis Bakery dan Butik Yang mengatakan bahwa:

“Kalau pembinaan pernah satu kali ikut acara pameran bersama teman-teman yang lolos seleksi itu hari kita diundang. Kue-kue sama pakaian yang

saya pasarkan juga ikut pameran waktu itu. Tapi kalau hadiah atau penghargaan belum pernah ada saya terima selama ini.”

Hal lain diungkapkan oleh Bapak AWD selaku pemilik usaha Ayam

Potong Karkas :

“Tidak pernah ada undangan atau dipanggil kesana selama sudah dikasi tau kalau saya lolos jadi Mitra Binaan. Hadiah atau penghargaan juga tidak pernah ada dikasi ”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo IV (Persero) khususnya unit PKBL tidak dilaksanakan dengan maksimal. Kegiatan pembinaan hanya dilaksanakan satu kali selama masa perjanjian berlaku dan masih ada Mitra Binaan yang tidak mendapatkan Pembinaan. Selain itu, pemberian *reward* yang telah ditetapkan dalam SOP juga tidak pernah dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilaksanakan masih belum efektif.

V.2. Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2011-2015

Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan dan pemberdayaan terhadap usaha kecil, perusahaan secara konsisten melaksanakan Program Kemitraan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan kemampuan perusahaan. Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.1 Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan PT.
Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2011-2015**

| No | Tahun | Jumlah Mitra Binaan | Jumlah Dana |
|--------|-------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2011 | 12 | Rp. 230.000.000,00 |
| 2 | 2012 | 18 | Rp. 365.000.000,00 |
| 3 | 2013 | 13 | Rp. 240.000.000,00 |
| 4 | 2014 | 11 | Rp. 200.000.000,00 |
| 5 | 2015 | 9 | Rp. 200.000.000,00 |
| Jumlah | | 63 | Rp. 1.235.000.000,00 |

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Berdasarkan tabel tersebut penyaluran dana pinjaman Program Kemitraan selama tahun 2011 sebesar Rp. 230 juta, pinjaman diberikan kepada 12 Mitra Binaan yang tersebar di wilayah Kota Makassar. Jumlah ini kemudian meningkat 59% pada tahun 2012 sebesar Rp. 365 juta yang diberikan kepada 18 Mitra Binaan. Namun pada tiga tahun berikutnya, jumlah dana pinjaman yang disalurkan kemudian terus mengalami penurunan diikuti berkurangnya jumlah Mitra Binaan. Pada tahun 2013 jumlah dana pinjaman yang disalurkan menurun sebesar 34% dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 240 juta yang diberikan kepada 13 Mitra Binaan, kemudian menurun 17% pada tahun 2014 sebesar Rp. 200 juta yang diberikan untuk 11 Mitra Binaan. Hingga penghujung tahun 2015 jumlah dana pinjaman yang disalurkan tidak ada peningkatan ataupun penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 200 juta, dengan

jumlah Mitra Binaan paling sedikit selama lima tahun terakhir sebanyak 9 Mitra Binaan.

Jumlah dana pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah Mitra Binaan semakin menurun beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Jumlah pinjaman yang kami salurkan beberapa tahun belakangan ini memang terjadi penurunan. Tapi ini bukan masalah dana yang tersedia untuk disalurkan, tapi lebih kepada jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha yang cenderung menurun. Selama lima tahun terakhir jumlah Mitra Binaan yang paling sedikit itu tahun kemarin 2015 cuma sembilan Mitra Binaan yang kami berikan bantuan. Kami menargetkan penyaluran dana tahun 2016 ini bisa meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.”

Hal yang senada juga diungkapkan oleh SH selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang Makassar menyatakan penurunan jumlah dana pinjaman yang disalurkan dipengaruhi oleh semakin selektifnya unit PKBL dalam menentukan Mitra Binaan, sehingga berakibat menurunnya jumlah Mitra Binaan selama lima tahun terakhir.

“Sejak lima tahun terakhir penyaluran dana Kemitraan memang menurun, begitu juga dengan Mitra Binaannya. Beberapa tahun ini kami sangat selektif dalam memilih Mitra Binaan, kami menerima yang memang benar-benar memenuhi syarat. Belajar dari tahun-tahun kemarin kalau diliat-liat banyak sekali pengembalian dana pinjaman yang tidak lancar bahkan macet. Jadi kami betul-betul selektif dalam menerima Mitra Binaan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah dana pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal tersebut bukan disebabkan karena adanya masalah keuangan perusahaan, tetapi karena semakin selektifnya pihak unit PKBL PT. Pelindo IV (Persero) dalam menentukan Mitra Binaan yang mengakibatkan

menurunannya jumlah Mitra Binaan sehingga dana yang disalurkan juga menurun.

V.3 Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang dilaksanakan melalui Program Kemitraan bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama yang pada akhirnya akan memantapkan struktur perekonomian dan pembangunan ekonomi nasional.

Hingga Desember 2015, PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar telah menyalurkan dana Program Kemitraan tahun 2015 sebesar Rp. 200 juta. Pinjaman diberikan kepada sembilan Mitra Binaan yang dinyatakan lulus seleksi dan dianggap layak untuk mendapatkan dana pinjaman Program Kemitraan. Hal tersebut diungkapkan oleh DS selaku Kepala Bagian Unit PKBL Kantor Cabang Makassar:

“Sejak awal hingga akhir tahun 2015 kita sudah mengeluarkan dana pinjaman untuk Program Kemitraan itu sebesar 200 juta. Pinjaman itu kita berikan kepada Mitra Binaan yang sudah lolos seleksi, totalnya ada sembilan usaha kecil dan menengah yang jadi Mitra Binaan kita pada tahun 2015. ”

Kesembilan Mitra Binaan tersebar di wilayah Kota Makassar dan terbagi ke dalam berbagai bidang usaha yang terdiri dari bidang jasa, perdagangan, peternakan, hingga kuliner. Perjanjian dengan Mitra Binaan tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2018. Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman terhitung tiga bulan setelah tanggal perjanjian yang

ditetapkan yaitu jatuh pada tanggal 30 Maret 2015. Hal tersebut disampaikan oleh S selaku staf Unit PKBL Kantor Cabang:

“Tahun 2015 kemarin kita punya sembilan Mitra Binaan, ada yang usahanya dibidang jasa, perdagangan, peternakan, ada juga kuliner. Perjanjiannya itu disepakati tanggal 30 Desember berjalan selama tiga tahun sampai 30 Desember 2018 nanti. Kalau angsuran pembayarannya akan ditagih tiga bulan setelah tanggal perjanjian, jadi tanggal 30 Maret 2015 sudah jatuh tempo. Nanti ditagih lima hari sebelum tanggal jatuh tempo kalau tidak ada inisiatif dari Mitra Binaan untuk membayar angsurannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan daftar kesembilan Mitra Binaan dan jumlah dana pinjaman yang disalurkan secara lebih rinci melalui tabel berikut ini:

Tabel V.2 Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan PT.

Pelindo IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015

| No | Nama Mitra Binaan | Pinjaman Pokok | Pinjaman Bunga | Kualitas |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 1 | Toko Musa | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 2.003.000,00 | Lancar |
| 2 | Depot Air Minum Isi Ulang "Nurul" | Rp. 30.000.000,00 | Rp. 3.005.000,00 | Lancar |
| 3 | Toko Intan | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 2.003.000,00 | Lancar |
| 4 | Kedai Batagor "Siomay Bandung" | Rp. 15.000.000,00 | Rp. 1.502.000,00 | Lancar |
| 5 | Mie Ayam Jenggot | Rp. 30.000.000,00 | Rp. 3.005.000,00 | Lancar |
| 6 | Toko Rahayu Ningsih | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 2.003.000,00 | Lancar |
| 7 | Balqis Bakery dan Butik | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 2.003.000,00 | Lancar |
| 8 | Lino Laundry | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 2.003.000,00 | Lancar |
| 9 | Usaha Ayam Potong Karkas | Rp. 25.000.000,00 | Rp. 2.504.000,00 | Lancar |
| Jumlah | | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 20.031.000,00 | Lancar |

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelindo IV (Persero), 2015

Berdasarkan tabel tersebut terdapat sembilan Mitra Binaan yang telah dinyatakan layak untuk menerima dana Program Kemitraan. Jumlah dana pinjaman yang diberikan kepada Mitra Binaan berbeda-beda, jumlahnya disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi *Personality 5C* dan hasil evaluasi pertumbuhan dan prospek usaha yang ditetapkan oleh Kantor Pusat. Jumlah

dana pinjaman Program Kemitraan yang telah disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan keseluruhan jumlah bunga pinjaman sebesar Rp. 20.031.000,00. Dana pinjaman tersebut diberikan kepada sembilan Usaha Kecil dibidang jasa, peternakan, perdagangan, dan kuliner yang berada di wilayah Kota Makassar.

Dari kesembilan Mitra Binaan, kualitas pinjamannya termasuk dalam kategori lancar sesuai klasifikasi kualitas pinjaman yang telah ditetapkan dalam SOP PT. Pelindo IV (Persero). Mitra Binaan melakukan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

V.4 Manfaat Program Kemitraan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar Tahun 2015

Penyaluran dana pinjaman Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo IV (Persero) memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha para Mitra Binaan. Perubahan terhadap aspek modal usaha sangat dirasakan oleh Mitra Binaan. Para pengusaha kecil awalnya tidak memiliki sumber modal lain, namun dengan adanya dana pinjaman yang didapatkan sangat membantu dalam mengembangkan usaha Mitra Binaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak RI selaku pemilik Toko Intan :

“selama dapat pinjaman dari Pelindo tidak susah lagi kalau mau beli barang-barang jualan. Modal yang didapat juga bisa disimpan sebagian, tidak kayak dulu sebelum ada pinjaman semua modal yang didapat harus diputar lagi untuk beli jualan.”

Melalui modal pinjaman yang didapatkan dari Program Kemitraan, Mitra Binaan dapat menambah aset mereka yang digunakan untuk mempermudah

kegiatan usaha dan membantu proses produksi. Dengan adanya penambahan alat sangat membantu dalam meningkatkan jumlah produksi dan lebih mengoptimalkan waktu pengerjaan produk. Dengan bertambahnya modal usaha, secara otomatis jumlah omzet yang dihasilkan terus meningkat. Hal ini disampaikan oleh BU selaku pemilik toko Balqis Bakery dan Butik:

“pinjaman modalnya itu dipake buat beli alat pemanggang sama alat-alat lain untuk bikin kue. Selama adanya tambahan alat, kita bisa terima lebih banyak pesanan kue dibanding sebelum-sebelumnya. Dulu itu kita cuma bisa terima dua sampai tiga pesanan kue besar per hari, tapi sekarang bisa sampai enam kue per hari. Kue-kue kecil yang dijual di toko juga lebih banyak. Kita bisa terima lebih banyak pesanan kue, jadi pemasukan yang didapat juga lebih banyak dibanding dulu.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh SHD pemilik Lino Laundry:

“Sejak dapat pinjaman modal dari Pelindo kita tidak pusing untuk masalah alat seperti mesin cuci, modalnya itu dipake untuk beli alat-alat. Selama ada penambahan mesin cuci kita bisa selesaikan cucian lebih cepat, apa lagi permintaan cuci express dulu kita tidak bisa terima banyak karna mesin cuci terbatas dan harus selesai dalam satu hari. Kalau sekarang kita bisa terima lebih banyak cucian karna kita bisa selesaikan banyak dalam satu hari. Pemasukannya juga lumayan bertambah jadi sangat membantu sekali.”

Perubahan juga terjadi dalam hal penambahan tenaga kerja. Beberapa pengusaha awalnya mendirikan usaha tanpa adanya tenaga kerja, dan ada juga yang hanya memiliki beberapa tenaga kerja. Namun semenjak mendapatkan pinjaman modal dari Program Kemitraan PT. Pelindo IV (Persero) para pengusaha meningkatkan jumlah produksi mereka dan membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini disampaikan oleh Bapak RA pemilik Kedai Batagor “Siomay Bandung” :

“Pinjaman modalnya bermanfaat sekali untuk kembangkan usaha batagor kita, pinjamannya kita pakai untuk membeli beberapa gerobak baru. Dulunya kita cuma punya beberapa gerobak, sekarang sudah bertambah. Pemasukan yang kita dapat juga semakin bertambah jadi kita bisa kasi pekerjaan beberapa orang untuk pakai gerobak yang baru ditambahkan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh EV pemilik usaha Mie Ayam Jenggot:

“Dulu anak saya yang bantu jualan di warung, tapi setelah dapat pinjaman saya pakai untuk perluas warung jadi pelanggan yang datang juga semakin banyak. Kita biasa sampai kewalahan layani pelanggan kan cuma berdua sama anak kadang-kadang dibantu suami, jadi kita pekerjakan beberapa orang untuk bantu-bantu. Hitung-hitung juga bantu orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Pendapatan yang didapat juga alhamdulillah terus meningkat dibanding sebelumnya. Jadi bantuan ini sangat membantu untuk usaha kami. ”

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya bantuan pinjaman dari Program Kemitraan pengusaha kecil yang bermitra dengan PT. Pelindo IV (Persero) merasakan banyak manfaat. Dana pinjaman yang didapatkan digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga omzet yang didapatkan juga semakin meningkat. Sebagian pengusaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dari dana pinjaman yang didapatkan.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alur Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo IV (Persero) dimulai pada tahap pengajuan proposal kegiatan usaha oleh calon Mitra Binaan. Kemudian diseleksi kembali dan dilakukan survey di tempat usaha calon Mitra Binaan. Hasil survey selanjutnya di evaluasi dan dilakukan penilaian terkait P 5C (*Personality, Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral*), kemudian hasilnya dianalisa kembali untuk ditentukan kelayakan dan besaran pinjaman setiap Mitra Binaan. Pada tahap akhir hasil evaluasi kelayakan dan besaran pinjaman dikalikan untuk menghitung jumlah dana pinjaman yang akan disalurkan. Dana pinjaman kemudian disalurkan setelah disetujui oleh direktur Pembina . Selama masa perjanjian, Mitra Binaan diberikan pembinaan berupa kegiatan pameran yang dilaksanakan langsung oleh PT. Pelindo IV (Persero).

Mitra Binaan diwajibkan untuk membayar angsuran pokok dan jasa administrasi setiap bulan. Apabila angsuran tidak dibayarkan maka akan dilakukan penagihan atau pemberian surat teguran. Untuk penyelesaian pinjaman bermasalah diatasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*).

Penyaluran dana Program Kemitraan PT. Pelindo IV (Persero) telah dilaksanakan sejak tahun 1992 dengan jumlah yang berbeda. Selama tahun 2011-2015 jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 1.235.000.000,00 yang diberikan kepada 63 Mitra Binaan.

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan tahun 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan mulai dari pengajuan proposal kegiatan usaha, seleksi administrasi, survey, evaluasi dan penilaian, analisa kelayakan, penetapan kelayakan dan besaran pinjaman, hingga proses pencairan dan penyaluran dana dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Pada pembayaran angsuran pinjaman belum ditemukan adanya angsuran yang tidak lancar hingga macet, karena masa perjanjian dengan Mitra Binaan pada tahun 2015 belum berakhir. Dengan dilaksanakannya Program Kemitraan ini, Mitra Binaan sangat terbantu dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Beberapa manfaat juga sangat dirasakan mulai dari penambahan alat produksi yang sangat membantu dalam keberlangsungan usaha, sehingga dapat meningkatkan omzet usaha. Beberapa Mitra Binaan juga dapat membuka lapangan kerja menggunakan dana pinjaman yang di dapatkan.

Melalui Program Kemitraan ini, badan usaha milik negara khususnya PT. Pelindo IV (Persero) tidak lagi hanya mengejar keuntungan semata dalam kegiatan usahanya. Saat ini BUMN juga menjadi penggerak perekonomian bangsa, Program Kemitraan yang dilaksanakan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Namun, dibalik keberhasilan Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi. Kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut terdapat pada pelaksanaan Pembinaan Mitra Binaan yang masih belum efektif. Pembinaan hanya satu kali dilaksanakan selama masa perjanjian dan masih terdapat Mitra Binaan yang tidak mendapatkan pembinaan. Selain itu, jumlah Mitra Binaan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan hal ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah dana pinjaman yang disalurkan. Pada tahun 2015 usaha kecil yang mendapatkan dana pinjaman Program Kemitraan PT. Pelindo IV (Persero) sebanyak sembilan Mitra Binaan, dengan total pinjaman sebesar Rp. 200 Juta.

VI.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh proses pembinaan yang telah diatur dan ditetapkan harus direalisasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan Mitra Binaan agar pembinaan yang dilakukan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Mitra Binaan.

2. Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo IV (Persero) demi menarik minat usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah Mitra Binaan dan jumlah dana pinjaman yang disalurkan setiap tahunnya.
3. Perlu dibentuk tim khusus dalam melakukan analisis kredit seperti *Account Officer*. Hal ini untuk menjadikan kredit pinjaman lebih aman dan dapat mengurangi pengelolaan kredit pinjaman bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- H.S, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Respomsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta : Erlangga
- Mukti, Fajar. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mursitama, Tirta, dkk. 2011. *Corporate Social responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF).
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Solihin, Ismail. 2011. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Untung, Budi Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility. Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang : SETARA Press.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.*

Republik Indonesia. *Keputusan Mentri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Mentri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.*

Jurnal:

Meutia, Sefrilia. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).* Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius), Vol. 2 No.2 Mei 2010.

Tanudjaja, Bing Bedjo. 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia.* NIRMANA, Vol. 8, No. 2 Juli 2006

Lainnya:

Riyadi, Eddie Sius. *Tanggung Jawab Bisnis Terhadap HAM.* Diunduh pada <http://perpustakaan.bappenas.go.id> pada tanggal 7 Oktober 2016, pukul 14.00

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility> pada tanggal 23 Oktober 2016, pukul 20.00

Suharto, Edi. 2006. *Pekerjaan Social Industri, CSR dan ComDev.*

L

A

M

P

I

R

A

N